

**EVALUASI KINERJA KEPALA DESA EKA SAPTA
KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU
KALIMANTAN TIMUR**



Oleh

Wa Ode Mulyati

45 13 021 057

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
program studi ilmu administrasi negara*

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2016

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI KINERJA KEPALA DESA EKA SAPTA KECAMATAN
TALISAYAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

WA ODE MULYATY

4513 021 057

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Husain Hamka, MS.

Dra. Hj. Asmirah,MSI

Diketahui Oleh;

Dean FISIP, Universitas Bosowa

Ketua Jurusan
Administrasi Negara



Dra. Hj. Juharni M.Si.



Drs. Uddin. B. Sore, SH, M.Si.



HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari, Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Delapan Tahun Dua Ribu Lima Belas Skripsi dengan Judul **“EVALUASI KINERJA KEPALA DESA EKA SAPTA KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”**

Nama : **WA ODE MULYATY**
Nomor Stambuk : **45 13 021 057**
Jurusan : **Administrasi Negara**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**



Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Negara (S-1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum;


Dra. Hj. Juharni, M. Si.

Dekan FISIP, Universitas Bosowa

Panitia ujian;


A. BURCHANUDDIN, S. Sos, M. Si

Ketua


Drs. Udin B. Sore, SH, M. Si

Sekretaris

Tim penguji;

1. Prof. Dr. H. Husain Hamka, MS
2. Dra. Hj. Asmirah, MSI
3. A. Burchanuddin, S. Sos, M. Si.
4. Drs. Natsir Tompo, M. Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

ABSTRAK

Wa Ode Mulyati. Evaluasi Kinerja Kepala Desa Eka Sapta Kec. Talisayan Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur dibawa pembimbing I Prof. Dr. H. Husain Hamka, MS dan pembimbing II Dra. Hj. Asmirah, MSI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Eka Sapta. (2) Bagaimana tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Eka Sapta. (3) Bagaimana tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan di Desa Eka Sapta. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi langsung. Teknik analisis data meliputi tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemeriksaan data dan penarikan atau kesimpulan.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Kepala Desa telah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Eka Sapta. Hal ini terlihat dari berbagai tugas kepala desa dalam menetapkan peraturan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan membina perekonomian desa. Ketiga tugasnya telah dijalankan sehingga kinerja kepala desa dalam bidang pemerintahan telah baik walaupun dengan sumber dayanya yang terbatas namun ambisi dan semangat kerjanya yang tinggi sehingga kepala desa mampu memegang amanah dari undang-undang desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Eka Sapta. (2) Pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan belum maksimal bagus karena anggaran desa terbatas. Hal ini terlihat dalam pembangunan jalan yang masih meresahkan masyarakat disebabkan jalanan yang tidak bagus, pembangunan listrik yang belum masuk desa sehingga terlihat di malam hari Desa Eka Sapta masih dalam kegelapan dan selalu menghambat pekerjaan-pekerjaan masyarakat. Namun sebaliknya dengan pembangunan pertanian, pembangunan dibidang pertanian ini sangat baik, efektif dan berhasil menciptakan hasil-hasil produksi yang unggul dan membawa citra baik desa dimata Kabupaten dan Kecamatan sehingga desa ini dijuluki oleh Bupati Berau Desa jagung dengan kualitas terbaik di Kalimantan Timur. (3) Tugas Kepala Desa Eka Sapta dalam kemasyarakatan belum maksimal hal ini terlihat dalam pemberdayaan masyarakat pada bidang keagamaan sudah baik, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang belum sering dilaksanakan oleh kepala desa, kurangnya kesadaran dari pemerintah desa bahwa kesehatan itu sangat penting karena masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang sejahtera. Dan pemberdayaan masyarakat pada bidang hukum belum terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat di desa ini kurang kesadaran akan hukum. Dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi juga masih terlihat sama dengan pemberdayaan yang lain, yang belum efektif.

Kata kunci : Evaluasi Kinerja, Kepala Desa Dan Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah Swt yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang serta puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga pada saat ini, penulis masih di beri nikmat kekuatan, keimanan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa “45” Makassar.

Sesungguhnya setiap usaha harus dibarengi dengan ketekunan, kesabaran dan kekuatan untuk hasil yang maksimal seiring seperti dalam AL-Qur'an surah Ar-Ra'd ayah 11 yang berbunyi “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”. Jadi maksud dari pada ayat ini bahwa harus adanya usaha/upaya untuk menginginkan suatu perubahan. Namun hal ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis ,karena dari pembahasan proposal sampai selesai pembahasan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penulisan, olehnya itu dengan penuh lapang dada penulis menerima teguran, saran atau kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan tersusunnya skripsi ini, tertentu tidak terlepas dari banyak pihak yang telah mendukung dalam tulisan skripsi sampai selesai. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng sebagai Rektor Universitas Bosowa “45” Makassar
2. Ibu Dra. Hj. Juharni Guntur, M.Si, selaku dekan Fisipol Universitas Bosowa “45” Makassar
3. Bapak Prof. Dr. H. Husain Hamka, MS. sebagai pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Asmirah, MSI sebagai pembimbing II dengan tulus serta penuh kesabaran ditengah-tengah kesibukannya beliau masih sempat menyisihkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang di harapkan.
4. Wakil Dekan A.Burchanuddin, S.sos, M.Si dan Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara bapak Uddin B. Sore, SH. M,Si serta staf dosen yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis merampungkan skripsi ini.
5. Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada Ibunda tercinta (Asima) dan Ayah Tercinta (Mando Parry) yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh, selama mengikuti pendidikan di Universitas Bosowa “45” Makassar. Selain itu juga tidak lupa penulis banyak terima kasih kepada saudara Kandung (Alia Dan Ali), Pacarku (Yono Saputra) beserta keluarganya yang telah menemaniku dalam proses penelitian sampai selesai sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.
6. Secara khusus juga penulis sampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Desa (Bapak Imam Supriyadi) beserta aparaturnya Desa Eka Sapta yang telah terima dan memberikan masukan berupa data dan informasi lengkap terkait penelitian penulis.

7. Seluruh keluarga besar Om, Tante dan Sepupu-Sepupuku serta teman-teman seperjuanganku (Widya Wanty Ratman, Aulia Insani Arsyad, Mirnawati, Ralia Ahmad, Rahma Kurnia, Erin Mitslia, Lestrina, Nova Sari dan lain-lain) dan teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, juga telah memberikan arahan, dorongan, motivasi sehingga skripsi bisa di selesaikan.

Semoga Allah Swt akan memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan serta dorongan yang di berikan kepada penulis. Aamiin

Makassar, 06 Maret 2016

Penulis

DAFTSR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN (Gambar)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pengertian Evaluasi.....	7
B. Pengertian Kinerja.....	13
C. Pengertian Kepala Desa.....	23
D. Tugas Kepala Desa.....	28
E. Kerangka Konseptual.....	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	34
A. Tipe Dan Dasar Penelitian.....	34
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	34

C. Populasi Dan Sampel.....	34
D. Sumber Data.....	36
E. Alat Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi.....	36
2. Kuesioner.....	36
3. Wawancara.....	36
4. Dokumentasi.....	37
F. Teknik Analisi Data.....	37
G. Teknik Pengelohan Data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Tugas Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan....	56
2. Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan kegiatan pembangunan.....	71
3. Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Identitas Desa Eka Sapta	44
Tabel 4.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk	47
Tabel 4.3 Klasifikasi Pendidikan	48
Tabel 4.4 Klasifikasi Berdasarkan pekerjaan	49
Tabel 4.5 Tempat Ibadah	50
Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang penetapan peraturan desa	57
Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa	62
Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang pembinaan dan peningkatan perekonomian Desa	67
Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang pembangunan jalan desa	73
Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang pembangunan listrik	77
Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang pembangunan pertanian	82
Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang pemberdayaan masyarakat pada bidang keagamaan	88
Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang pembinaan masyarakat pada bidang kesehatan	92

Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang pemberdayaan masyarakat pada bidang hukum	97
Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi	101

DAFTAR BAGAN (GAMBAR)

Tabel	Halaman
Gambar 2. Komponen dan analisis data (flow model).....	39
Gambar 4.1 Peta Desa Eka Sapta	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kp. Eka Sapta Kec. Talisayan.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan reformasi di Indonesia telah berlangsung selama kurang lebih satu dekade lamanya sampai sekarang. Berbagai perubahan yang telah dilakukan didalam berbagai bidang aspek ketatanegaraan. Perubahan terhadap UUD 1945 menjadi peluang besar bagi perubahan yang mendasar dalam proses menuju negara yang demokratis yang di cita-citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dengan terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan.

Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menimbulkan kebingungan bagi pemerintah desa, khususnya dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini disebabkan tidak diikutinya undang-undang baru tersebut dengan peraturan pemerintah sebagai penjabarannya, sehingga belum ada Perda yang mengacu pada undang-undang baru tersebut. Dilain sisi yang menyatakan bahwa Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum dapat dijalankan secara maksimal termasuk didalamnya tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam salah satu fungsinya bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.

Lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki masing-masing peran dan fungsi serta kewenangan, yang dalam fungsinya masing-masing dari setiap lembaga saling berkesinambungan satu sama lainnya. Di Indonesia terdapat adanya pembagian peran dan fungsi dari setiap lembaga Negara dan itu tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat saja. Pembagian fungsi tersebut juga terjadi di daerah desa. Dalam sebuah desa, juga terdapat adanya lembaga atau perangkat-perangkat desa. Dan setiap perangkat desa memiliki peran dan tugas masing-masing.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten/kota, sebagaimana disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Peran masyarakat dan sektor swasta merupakan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi. Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas



penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara, sektor swasta dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi/permasalahan riil sementara, Desa Eka Saptta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini adalah permasalahan kualitas kinerja kepemimpinan kepala desa dalam pemerintahan, kemasyarakatan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik dan juga masalah rendahnya tingkat musyawarah yang dilakukan aparatur desa dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Kinerja kepemimpinan yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi didalam kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar meningkatkan produktifitas sehingga apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk meningkatkan kinerja yang baik seorang pemimpin harus introspeksi diri demi tercapainya kinerja yang lebih baik kedepannya, bekerja sesuai posisi, porsi, dan jobnya masing-masing.

Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas dalam roda pemerintahan.

Maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain

terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya.

Pada tahun 2008 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, kajian ini telah menghasilkan cetak biru (*blue print*) yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (*problem solving*) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Lebih lanjut modul-modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan & Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang, **“Evaluasi Kinerja Kepala Desa Ekasapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Kalimantan Timur”**.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka untuk memperjelas masalah agar lebih terarah. Dan untuk itu yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Eka Sapta?
2. Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Eka Sapta?



3. Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan di Desa Eka Sapta?

C. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan. Mengacu pada permasalahan yang ada maka tujuan yang ditinjau dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa dan aparat desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Di Desa Eka Sapta.
2. Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa dan aparat desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pembangunan Di Desa Eka Sapta.
3. Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa dan aparat desa dalam menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan Di Desa Eka Sapta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Desa Eka Sapta dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa dan terutama tugas dibidang pencatatan register yang terpenting bagi kebutuhan pembangunan.
2. Bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang kinerja kepala desa dalam menjalankan peran dan fungsinya pada umumnya dan register desa pada khususnya.
3. Bahan masukan dan pertimbangan pihak pemerintahan maupun pihak lainnya dalam rangka pembinaan sistem lembaga pemerintahan yang ada di

pedesaan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam sistem pemerintahan di desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Evaluasi

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000: 3). Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Selain itu menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi 24 kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Selanjutnya bahwa evaluasi adalah kata 24 kriteri yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan 24 kriteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Boyle (dalam Suharto, 2005:120). Sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Sosial masukan
- b. Sosial keluaran
- c. Sosial hasil

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasikan mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasikan tingkat pencapaian tujuan..

- b. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- c. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial.

Dalam konteks ini dapat diartikan, sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan 25 kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan diimplementasikan.

1. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Evaluasi tahap perencanaan yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat

untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

- c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai (Suharto, 2006: 12).

2. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

- a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan (Wahab, 2002: 51).

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu:

- a. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan.
- b. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
- c. *Assessment*, Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan (Dunn, dalam Suharto 2008:8).

3. Proses Evaluasi

Suatu proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana

evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain:

- a. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberi tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
- b. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari.
- c. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
- d. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
- e. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena

menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.

- f. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

B. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165).

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50).

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu (Robbins, 2006:260):



1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Pemahaman tentang kinerja (*performance*) memperlihatkan sampai sejauh mana sebuah organisasi; baik pemerintah, swasta, organisasi laba ataupun nirlaba, menafsirkan tentang kinerja sebagai suatu pencapaian yang relevan dengan tujuan organisasi. Sehingga, terdapat dua asumsi umum tentang titik berangkat pemahaman pengertian kinerja. Asumsi pertama, pengertian kinerja yang dititikberatkan pada kinerja individu, dalam pengertian sebagai bentuk prestasi yang dicapai individu berdasarkan target kerja yang diembangkannya atau tingkat pencapaian dari beban kerja yang telah ditargetkan oleh organisasi kepadanya. Asumsi kedua, yaitu; pengertian kinerja yang dinilai dari pencapaian secara

totalitas tujuan sebuah organisasi dari penetapan tujuan secara umum dan terperinci organisasi tersebut. Misalnya; pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi dari penjabaran visi dan misi organisasi tersebut. Tetapi ada asumsi lain yang tidak terlalu umum digunakan sebagai titik berangkat dalam pemahaman kinerja, yaitu penilaian kinerja proses.

Terkait dengan ketiga asumsi tersebut di atas, Sudarmanto (2009) mengemukakan ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu :

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (*outcome*) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.

Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

Sedangkan Lusthaus *et. al.*, (2002) menyatakan bahwa secara umum, *literature* pengembangan organisasi membahas kinerja pada empat tingkatan: (1) individu karyawan (*performance appraisal*), (2) tim atau kelompok kecil (*team performance*), (3) program (*program performance*), dan (4) organisasi (*organizational performance*).

Pengertian kinerja sangat beragam, tetapi dari berbagai perbedaan pengertian tersebut dapat dikategorikan dalam dua garis besar pengertian (Sudarmanto, 2009), sebagai berikut :

1. Pada konteks ini, hasil di nyatakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Dari definisi tersebut, Benardin mengemukakan pengertian kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat (*trait*) dan perilaku. Pengertian kinerja juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumberdaya yang digunakan dalam produksi itu.
2. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi, unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Dalam pengertian ini, kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri.

Pandangan tentang kinerja yang didasarkan pada ketiga asumsi tersebut oleh para ahli masing-masing memberi pengertian yang berbeda baik kinerja secara individu maupun organisasi. Seperti pandangan bahwa kinerja dipandang sebagai bagian dari fungsi sistem kerja dari karakteristik seorang pekerja, karena karakteristik pekerja diasumsikan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja. Hal

ini didasari pada perbedaan-perbedaan individu dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mempengaruhi kinerja.

Bahua (2010) mengemukakan pengertian kinerja (*performance*) sebagai aksi atau perilaku individu yang berupa bagian dari fungsi kerja aktualnya dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi yang mempekerjakannya. Mungkin pengertian kinerja yang digambarkan oleh Hofer (1983) dalam Carton dan Hofer (2006) dapat mewakili pengertian kinerja dari asumsi proses. Bahwa kinerja adalah sebuah konsep kontekstual yang terkait dengan fenomena yang sedang dipelajari. Dalam konteks kinerja keuangan organisasi, kinerja adalah ukuran dari perubahan keadaan keuangan organisasi, atau hasil keuangan yang dihasilkan dari keputusan manajemen dan pelaksanaan keputusan-keputusan oleh anggota organisasi. Karena persepsi hasil ini adalah kontekstual, langkah-langkah yang digunakan untuk mewakili kinerja yang dipilih didasarkan pada kondisi organisasi yang diamati. Langkah-langkah yang dipilih merupakan hasil yang dicapai, baik atau buruk. Selama nilai yang diciptakan dengan menggunakan aset, kontribusinya sama atau lebih besar dari nilai yang diharapkan oleh mereka, aset akan terus tersedia untuk organisasi dan organisasi akan terus eksis.

Lusthaus *et. al.*, (2002) mengemukakan bahwa setiap organisasi harus berusaha memenuhi tujuannya dengan pengeluaran yang diterima dari sumberdaya sambil menjamin keberlanjutan jangka panjang. Berarti tugas atau pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien dan tetap relevan dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan). Itulah kinerja organisasi yang harus menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut : (a) bagaimana organisasi efektif

dalam bergerak kearah pemenuhan misinya (misalnya : efektivitas program utama, eefektivitas harapan klien, efektivitas tanggungjawab fungsional, dan efektivitas memberikan layanan yang bermanfaat); (b) bagaimana organisasi efektif dalam memenuhi misinya (misalnya : presepsi efisiensi prosedur kerja/layanan, mengacu kepada perbandingan biaya produk dan layanan, dan perenggangan alokasi keuangan); (c) apakah organisasi masih terus relevansinya dari waktu ke waktu (misalnya : Adaptasi visi misi, pertemuan *stakeholder*, kebutuhan beradaptasi dengan lingkungan, dan keberlanjutan dari waktu ke waktu); (d) apakah organisasi secara finansial layak (misalnya : organisasi memiliki beberapa sumber dana, sumber pendanaan yang dapat dipercaya dari waktu ke waktu, dan bantuan dana dikaitkan dengan pertumbuhan atau perubahan yang dicapai); dan (e) seberapa baik kinerja organisasi.

Pengertian yang dikemukakan oleh Lusthaus *et.al.*, di atas menggambar kan pemahaman kinerja dari asumsi organisasi dan asumsi proses, karena selain menekankan hasil kerja yang diukur dari organisasi sebagai kinerja, juga mempertanyakan bagian-bagian dari proses yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi dan memberi penilaian hasil terhadap bagian-bagian proses organisasi bila pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab.

Dari berbagai pandangan atau pengertian yang dikemukakan beberpa penulis di atas, maka dapat dikemukakan pengertian kinerja dalam tulisan ini yaitu kinerja adalah pencapaian hasil dari suatu fungsi sistem kerja akibat respon individu dan menjadi catatan hasil kerja serta menjadi kemampuan organisasi mencapai atau memenuhi tujuannya dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan yang berkelanjutan.

1. Penilaian Kinerja

Tolok ukur penilaian kinerja pada setiap kasus analisis kinerja bagi sebuah organisasi atau lembaga memperlihatkan perbedaan, sebab aktivitas setiap organisasi atau lembaga memiliki ciri spesiknya masing-masing. Perkembangan awal penilaian kinerja lebih dititikberatkan pada profitabilitas organisasi, sehingga penilaian organisasi difokuskan pada identifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi pekerja dengan rekayasa optimal agar orang-orang berperilaku tertentu sesuai sistem produksi organisasi, pimpinan atau manajer berorientasi memproduksi barang dan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, hal itu sejalan dengan praktek manajemen yang berlaku pada saat itu.

Selanjutnya Lusthaus, *et.al*, (2002) mengidentifikasi beberapa hal dalam organisasi yang berhubungan dengan kinerja, meliputi : (a) kinerja dalam kaitannya dengan efektivitas; (b) kinerja dalam kaitannya dengan efisiensi; (c) kinerja dalam kaitannya dengan relevansi yang sedang berlangsung; dan (d) kinerja dalam kaitannya dengan viabilitas keuangan. secara aktual yang menuntut pengukuran secara aktual keseluruhan kinerja organisasi, tidak hanya efisiensi atau dimensi fisik, tetapi juga dimensi non fisik (*intangibile*).

Terkait penilaian kinerja dengan pendekatan standar penilaian yang dirangkum dalam Sudarmanto (2009) bahwa penilaian atau pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu : (a) pendekatan atau penilaian kinerja berbasis pelaku; (b) pendekatan atau penilaian kinerja berbasis *personality trait* ; (c) pendekatan atau penilaian kinerja berbasis perilaku; dan (d) pendekatan atau penilaian kinerja berbasis hasil.



Selanjutnya Parmenter (2010), mengemukakan tiga tipe ukuran kinerja, yaitu : (1) indikator hasil utama (*key result indicators*), menggambarkan bagaimana keberhasilan anda secara perspektif, (2) indikator kinerja (*performance indicators*), menjelaskan apa yang harus anda lakukan, dan (3) indikator kinerja utama (*key performance indicators*), menjelaskan apa yang harus anda lakukan untuk meningkatkan kinerja secara dramatis.

Berbagai pengertian penilaian kinerja telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, maka dalam tulisan ini dapat dikemukakan bahwa penilaian kinerja secara komprehensif mencakup penilaian secara formal dan sistematis dengan dimensi hasil, perilaku, pelaku, dan sifat personalitas yang didasarkan pada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan serta visi, misi, dan tujuan organisasi yang bertujuan memperbaiki kinerja individu, kinerja organisasi dan kinerja proses.

2. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja selalu menekankan pada tujuan tertentu dan manfaat yang dirasakan untuk keberlanjutan organisasi serta dorongan bagi karyawan untuk lebih meningkatkan kapabilitas. Dari sudut pandang organisasi tujuan dan manfaat penilaian kinerja, telah menemukan kesesuaian kedudukan dari suatu desain organisasi yang tentu saja diakibatkan oleh kinerja yang unggul. Selanjutnya dikemukakan bahwa kapasitas pengelolaan informasi adalah seimbang dengan permintaan untuk meningkatkan kinerja.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa kedudukan penilaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk melakukan desain organisasi dan tujuan salah satunya meningkatkan kinerja seimbang dengan permintaan pengelolaan informasi pada organisasi. kinerja perusahaan tergantung pada bagaimana suatu organisasi

perusahaan menciptakan kecocokan dengan hal kecil dilingkungannya. Richard (2006) menyebutnya sebagai mengorganisir pandangan yang masuk akal. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja dapat disimak pada pendapat yang dikemukakan bahwa kinerja karyawan merupakan evaluasi secara reguler. Karyawan ingin umpan balik-mereka ingin mengetahui apa yang supervisi mereka pikirkan tentang pekerjaan mereka. Evaluasi kinerja reguler tidak hanya menginginkan umpan balik untuk karyawan, tetapi juga menginginkan koreksi defisiensi terhadap kemampuan karyawan. Evaluasi atau *review* juga membantu sebagai kunci membuat keputusan personal, seperti hal-hal berikut ini: (1) pembenaran promosi, perpindahan, dan pemberhentian, 2. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, (3) menyediakan umpan balik untuk pekerja dengan kinerja mereka, dan (4) menentukan keperluan penyesuaian upah. Kebanyakan organisasi memanfaatkan sistem evaluasi; salah satu sistem yang dikenal adalah penilaian kinerja. Suatu penilaian kinerja adalah sebuah sistem formal terstruktur yang dirancang untuk mengukur kinerja pekerjaan secara aktual dari seorang karyawan terhadap desain standar kinerja. Walaupun sistem penilaian kinerja sangat organisatoris, semua karyawan yang dievaluasi mempunyai tiga komponen sebagai berikut : (1) spesifikasi pekerjaan berhubungan kriteria terhadap ukuran-ukuran yang dapat dijadikan pembandingnya, (2) suatu skala peringkat yang membiarkan karyawan mengetahui sampai seberapa baik mereka terhadap kriteria, dan (3) metode objektif, prosedur dan bentuk untuk menentukan penilaian.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi secara umum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi, namun demikian kinerja organisasi tidak bisa terlepas atas kinerja individu. Spektrum faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sangat beragam cakupannya, tergantung pada organisasi dan lingkungannya.

Studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sangat ditentukan oleh jenis dan profil organisasi serta tujuan penelitian dilakukan. Sebagai contoh studi yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yang bernama *Goliath Business Knowledge on Demand*, dimana temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam kewirausahaan, manajemen, dan daerah pemasaran telah menunjukkan bahwa orientasi pasar, orientasi pembelajaran, gaya manajemen kewirausahaan, dan fleksibilitas organisasi sangat berkorelasi dengan kinerja organisasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa organisasi nirlaba dan bisnis tidak menganggap diri mereka berbeda pada empat faktor keberhasilan atau korelasi tersebut, meskipun tingkat usaha mandiri melaporkan kinerjanya lebih tinggi dari organisasi nirlaba. Sebuah langkah logis berikutnya adalah untuk membandingkan layanan bisnis untuk perawatan kesehatan dan pendidikan, layanan utama dari sektor nirlaba.

Studi yang dikembangkan oleh Lusthaus, *et.al*, (2002) yang terus menerus menelaah dan mengembangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dibahas dalam tulisannya yang berjudul "*organizational Assessment: A Framework for Improving Performance*", menunjukkan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang dapat diuraikan elemen-elemennya. Ketiga faktor tersebut adalah : (a) kapasitas organisasi (*organizational capacity*);

(b) motivasi organisasi (*organizational motivation*); dan (c) lingkungan eksternal (*External environment*).

C. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 24 peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. (Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa).

Menurut Siagian (1991:2) "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Sadu Wasistiono mengatakan bahwa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa setelah setahun berlakunya UU No. 32 Tahun 2004.

Salah satu konsekuensi logis dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama aktivitas Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat, maka diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
 - c. Buku Data Inventaris Desa;
 - d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
 - f. Buku Data Tanah di Desa;
 - g. Buku Agenda; dan
 - h. Buku Ekspedisi.

2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
 - a. Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.

3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
 - a. Buku Anggaran Penerimaan;
 - b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
 - c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;

- d. Buku Kas Umum;
 - e. Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 - f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
 - g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.
4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
- a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek; dan
 - d. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
- a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Data Keputusan BPD;
 - c. Buku Data Kegiatan BPD;
 - d. Buku Agenda BPD; dan
 - e. Buku Ekspedisi BPD.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok

orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri.

Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan aktifitas ditingkat desa, maka berbicara tentang administrasi desa berarti yang dimaksud dengan "administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemerintahan, seperti antara lain, baik dalam menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti

pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
- c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi.

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat.

Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- a. Tugas bidang pemerintahan
- b. Tugas bidang pelayanan Kepada masyarakat.
- c. Tugas bidang ketatausahaan.

D. Tugas Kepala Desa

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang. PP No. 43 tahun 2014.

Pasal 1 :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Struktur Pemerintah Desa
2. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertugas menyelenggarakan:

1. Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Kemasyarakatan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 diatur juga mengenai tugas kepala desa yaitu Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Mengacu pada tugas pokok Kepala Desa yang menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 maka, Tugas pokok Kepala Desa Eka Sapta dalam urusan pemerintahan diantaranya adalah :

1. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
2. Menetapkan Peraturan Desa;
3. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;

Tugas pokok Kepala Desa Eka Sapta dalam urusan pembangunan Desa diantaranya adalah :

1. Pembangunan jalan
2. Pembangunan listrik
3. Pembangunan pertanian

Tugas pokok Kepala Desa Eka Sapta dalam urusan kemasyarakatan Desa diantaranya adalah :

1. Pembinaan masyarakat pada bidang agama
2. Pembinaan masyarakat pada bidang kesehatan
3. Pembinaan masyarakat pada bidang hukum
4. Pembinaan masyarakat pada bidang ekonomi

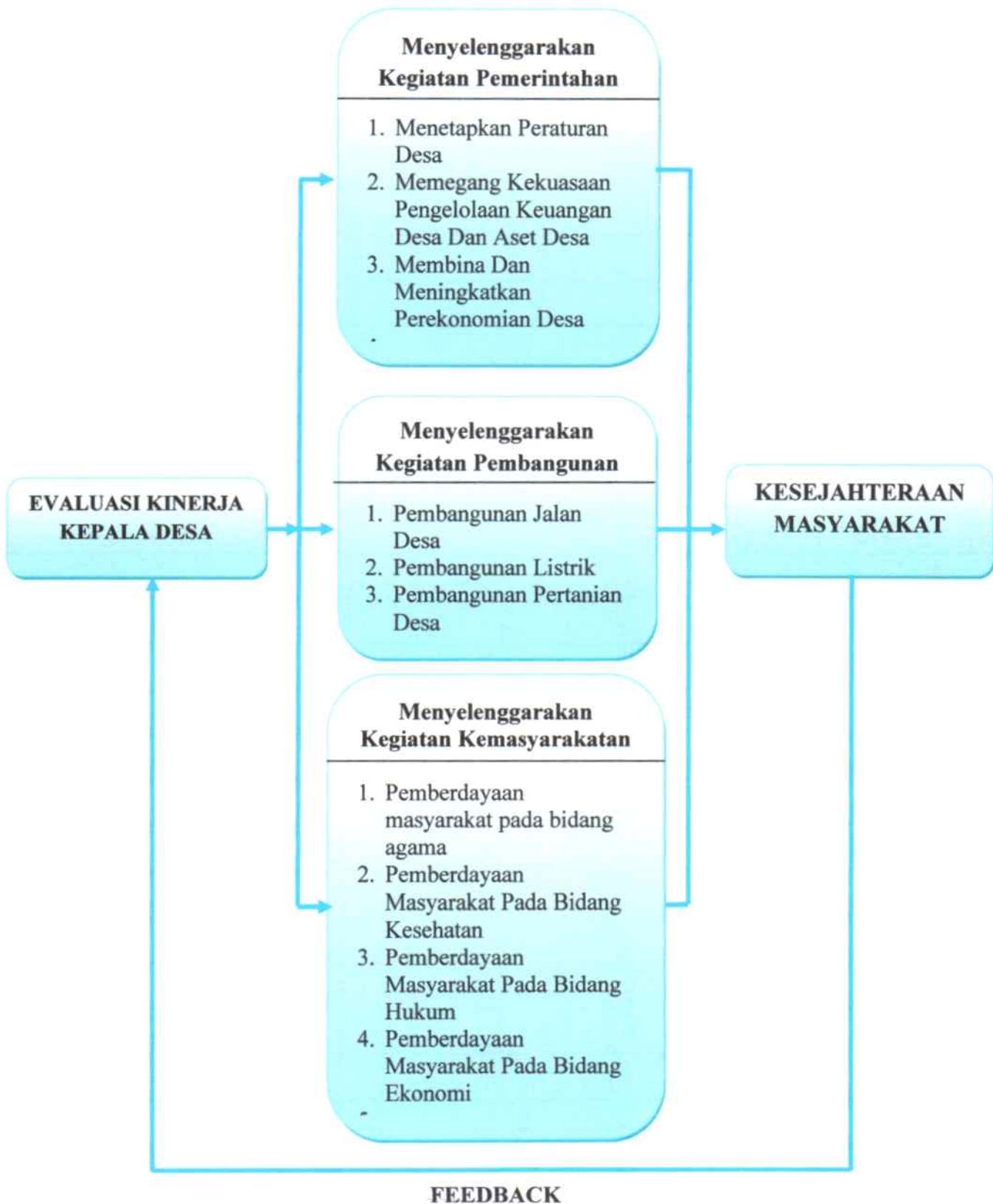
Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban. Wewenang yang dimaksud di atas merupakan format yang diakui oleh konstitusi NKRI. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi kepala desa tidaklah Mudah. Sangat banyak. Diantaranya adalah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

E. Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dalam mengevaluasi kinerja Kepala Desa dalam masa pemerintahannya maka dilihat dari peran dan fungsinya sebagai penilaian bahwa kinerja Kepala Desa sudah efektif atau belum. Maka peneliti ingin mengkaji sejauh mana pencapaian hasil kerja Kepala Desa Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian

1. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat Deskriptif kualitatif kuantitatif, yaitu suatu tipe penelitian mix metode yaitu dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas sesuai masalah penelitian yang peneliti ajukan dalam penelitian ini dalam upaya mendapatkan data, peneliti memulai dengan mendapatkan informasi dalam bentuk angka-angka yang kemudian peneliti mendeskripsikannya.
2. Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden dan informan dari objek penelitian melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) dan untuk melengkapi data primer penelitian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.



B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ekasapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau sebanyak 233 KK.

2. Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih banyak bersentuhan langsung dengan objek penelitian karena pekerjaannya. Peneliti jadikan responden dalam penelitian ini antara lain :

a. Informan :

- Kepala desa
- Sekretaris desa
- Ketua BPD
- Ketua LPM
- Ketua PKK
- Ketua LINMAS
- Ketua Karang Taruna
- Kepala sekolah TK
- Kepala sekolah SD

b. Responden

Dalam penelitian ini responden yang dilakukan adalah :

1) Unsur masyarakat

- Petani 21 orang
- Pedagang 10 orang
- Wiraswasta 9 orang
- Buruh Tani 3 orang
- PNS 20 orang

2) Unsur aparatur desa 9 unsur ketua.

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Ketua BPD
- Ketua LPM
- Ketua PKK
- Ketua LINMAS
- Ketua Karang Taruna
- Kepala Sekolah TK

- Kepala Sekolah SD

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen yang sudah ada atau segala sesuatu dokumen yang terkait dengan evaluasi kinerja kepala desa di Desa Eka Sapta sedangkan.
2. Data primer adalah data yang bersumber dari responden maupun informan yang peneliti ambil dari studi lapangan yang kemudian peneliti olah kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

E. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

1. Observasi

secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung kinerja Kepala Desa Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

2. Kuesioner

Peneliti membuat daftar pertanyaan tertulis dengan menyediakan alternatif jawaban sesuai data yang peneliti perlukan dari responden.

3. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur. Wawancara peneliti lakukan untuk melengkapi data yang tidak sempat terkaver pada kuesioner, sekaligus untuk melengkapi data yang dirasakan

perlu sebagai bahan banding dari hasil data pengamatan yang peneliti lakukan dengan perbandingan data dari kuesioner. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono 2010 : 140).

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara tidak berstruktur ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam.

4. Dokumentasi

Menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian yang akan peneliti teliti. Menelaah dokumen-dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung jawab kepala desa.

Didalam menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto 2002 : 144)

F. Teknik analisis data yang digunakan

1. Analisis data kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah perhitungan melalui analisis statistik dimana data ordinal dikonversi akan menjadi data interval. Untuk pengembangan teknik analisis, penelitian yang akan mengarah pada pengukuran sikap, terutama untuk keperluan konfirmasi atau *cross check* keadaan dilapangan. Hasil dari setiap item variabel mempunyai gradasi, dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka setiap pernyataan dapat menggunakan empat gradasi dengan perhitungan hasil penjumlahan skor setiap jawaban akan dibagi dengan

jumlah supervie sehingga diperoleh rata-rata skor setiap pertanyaan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumus berikut :

$$\text{Skor} : \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72}$$

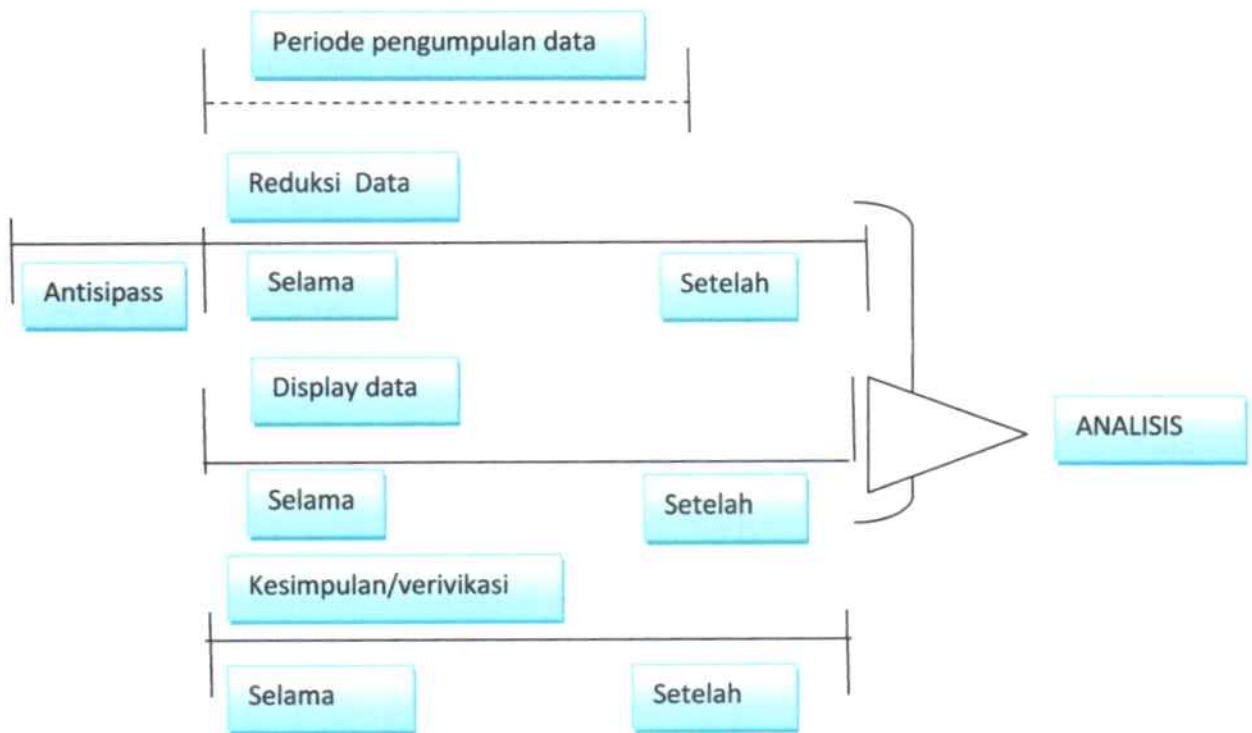
Keterangan : F : Frekuensi
B : Bobot
N : Jumlah Responden

Dari oridinal yang dimiliki kemudian diubah menjadi data interval, dengan cara mencari rata-rata skor setiap item (indikator terukur) dari variabel independen (angka mutlak-maupun presentase), dalam klasifikasi :

- a. Sangat tinggi, dsb : Apabila skor rata-rata dari indikator 4-5 atau 80% -100%
- b. Tinggi, dsb : Apabila skor rata-rata dari indikator 3-<4 atau 60%-<80%
- c. Cukup tinggi, dsb : Apabila skor rata-rata dari indikator 2-<3 atau 40%-<60%.
- d. Rendah, dsb : Apabila skor rata-rata dari indikator 1-<2 atau 20<40%.
- e. Sangat rendah, dsb : Apabila skor rata-rata dari indikator <1 atau <20%

2. Analisis data kualitatif

Teknis analisis data kualitatif dikemukakan miles dan huberman (2007:16-20) bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu dat *reduction* dara *display*, dan *concoclusin drawing/ verification*Dalam. Langkah-langkah analisis di tunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2. Komponen dan analisis data (flow model) (sumber:miles dan huberman, 2007:18)

G. Teknik Pengolahan Data

setelah meneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipator sebelum melakukan reduksi data.

1. Data collection, yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber data melalui teknik wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan dalam wawancara dapat langsung dianalisis oleh peneliti. Apabila jawaban dan diperoleh belum memuaskan atau belum cukup, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi sampai data dianggap valid.
2. Reduksi data, data diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian data, setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Simpulan:verivikasi, langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut mile and huberman adalah penarikan kesimpulan atau verivikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila akan tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Gambar 4.1 Peta Desa Eka Sapta



Sumber: Kantor Desa Eka Sapta Kec. Talisayan Kab. Berau 2015

Desa Eka Sapta yang secara administrative berada dalam wilayah Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Desa Eka Sapta terletak di wilayah kota Kecamatan Talisayan, kurang lebih 157 Km dari Kabupaten Berau, dengan dibatasi oleh wilayah kecamatan-kecamatan tetangga. Desa ini dipilih karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Talisayan dan merupakan desa yang memiliki karakter masyarakat desa dengan jumlah penduduk yang mencapai 893 jiwa, Desa Eka Sapta sangat berpotensi untuk menjadi desa yang otonom, sebab desa ini dijuluki dengan desa jagung, dengan sejumlah puluhan hektar lahan jagung dan salah satu desa penghasil

jagung terbesar di Kabupaten Berau. Akses dari desa ke kota yang begitu jauh telah menjadikan rakyat di desa ini begitu susah memperoleh berbagai informasi.

Selanjutnya setelah melalui proses pemilihan umum yang demokratis oleh masyarakat Desa Eka Sapta, **Imam Supriyadi** terpilih sebagai Kepala Definitif Desa Eka Sapta Priode 2011-2017. Hasil pemilihan tersebut, kemudian disahkan oleh Bupati Di Kabupaten Berau melalui penerbitan SK Bupati Nomor 111.26-442 Tahun 2011.

Keadaan geografis Desa Eka Sapta merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Talisayan dan terletak di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Desa Eka Sapta memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara Berbatasan Dengan Desa Sumber Muliya
- Timur Berbatasan Dengan Desa Suka Muriya
- Selatan Berbatasan Dengan Desa Purnasari Jaya
- Barat Berbatasan Dengan Hutan HPH Sumalindo

Visi Kepala Desa Eka Sapta ialah “meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan setiap penduduk kampung Eka Sapta dan menjalin kerukunan antar umat beragama, suku dan golongan”. Sedangkan Misi Kepala Desa Eka Sapta yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan kampung Eka Sapta agar lebih selangkah lebih maju dari saat sekarang.
2. Menjamin kemudahan dari hal pengurusan bantuan permodalan dalam bentuk peminjaman disegala hal seperti : pertanian, prkrbunan, peternakan dan perdagangan melalui kerjasama dengan Bank BRI, BPD, KOPERASI dan yang lainnya.

3. Memanfaatkan lahan tidur yang selama ini belum tersentuh contohnya lahan kas kampung, lahan fasilitas umum yang masih kosong dan masih banyak lahan lagi yang lain-lainnya.
4. Melakukan pembinaan terhadap kepemudaan (karang taruna), keagamaan, kemasyarakatan dan kesenian.
5. Menjalin kerja sama dengan kampung-kampung sekitar Eka Sapta.
6. Mencari investor untuk menanamkan modalnya dikampung Eka Sapta untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lebih baik dari sekarang dan meningkatkandaya beli masyarakat dikampung Eka Sapta ini.
7. Membentuk pemerintahan yang kompak, jujur, adil, disiplin, amanah dan tegasdalam segala hal.
8. Memperbaharui data kependudukan kampung yang akurat dan menambah peralatan kampung yang belum lengkap seperti komputer atau laptop dan yang lainnya.

Tabel 4.1
Identitas Desa Eka Sapta

No	Uraian	Keterangan
1	Identitas : a. Nama Desa b. Pusat Pemerintahan/Kantor c. Kecamatan d. Kabupaten/Kota	Eka Sapta Jln. Pulau dewata. Kode pos Talisayan Berau
2	Data Umum : a. Batas Wilayah Desa b. Kondisi Geografis c. Topografi Bentuk Wilayah d. Jarak pusat pemerintahan desa e. Luas Daerah Wilayah Peruntukan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Utara : Desa Sumber Muliya • Timur : Desa Suka Muriya • Selatan : Desa Purnasari Jaya • Barat : Hutan PHP Sumalindo ----- MDTL • Dataran Berombak 0% • Dataran Berbukit 0% • Kecamatan 17 Km • Provinsi ----- • Kabupaten/Kota 157 Km • Tanah Kering 1.620 Ha • Tanah Hutan 80 Ha • Tanah Fasilitas Umum 4,5 Ha
3	Keanggotaan Desa : a. DPD b. LPM c. RT d. Karang Taruna e. Dasa Wisma	
4	Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian: a. Jumlah Dan Keadaan Penduduk b. Sarana Perekonomian c. Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah 233 kk • Laki-laki : 495 jiwa • Perempuan : 398 jiwa • WNI : 398 orang KUD 1 Buah Pasar 1 Buah • TK : 1 Buah • SD/MI : 1 Buah • SMP/MTS : 1 Buah • SMA/MA : 1 Buah

	<p>d. Sarana Jalan Dan Jembatan e. Sarana Transportasi Darat</p> <p>f. Sarana Pencaharian Penduduk</p> <p>g. Sarana Sosial Budaya</p>	<p>Jembatan 1 Buah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobil ----- • Motor roda dua 200 Buah <p>• Tani 98%</p> <p>• PNS 1%</p> <p>• Wiraswsta 1%</p> <p>• Tempat Ibadah Masjid 3 Buah Gereja 1 Buah</p> <p>• Perumahan Penduduk Rumah Panggung 210 Buah Semi Permanen 7 Buah</p>
--	---	---

Sumber : Kantor Desa Eka Sapta Kec. Talisayan Kab. Berau Dalam Angka 2015.

Angka curah hujan rata-rata cukup tinggi, sebesar 1.112,4 m³ pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Eka Sapta beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 75% dan suhu udara rata-rata 24-38dc, serta curah hujan cukup tinggi terjadi pada bulan Juni sampai dengan Oktober.

Iklm Desa Eka Sapta sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Berau, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan April-November.

Luas Desa Eka Sapta sebesar 1.715,5 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat di kelompokkan seperti untuk fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 4,5 Ha; luas tanah kering 1620 Ha; luas hutan 80 Ha. Sedangkan untuk fasilitas sosial 11 Ha.

1. Sejarah Desa Eka Sapta

Pada awal terbentuknya Desa Eka Sapta Kecamatan Talisayan merupakan daerah transmigrasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Desa ini awalnya ditinggali oleh orang-orang yang ingin merubah nasibnya dari pulau Jawa, NTT, NTB, Makassar, dan Madura. Sebelum menamai desa Eka Sapta ada seorang pencetus utama desa Eka Sapta yang bernama Pran Liberin, beliau berasal dari Nusa Tenggara Timur, pada saat itu beliau bingung mau memberikan nama kampung apa untuk tempat tinggalnya ini dan akhirnya beliau melakukan peneltiian beberapa bulan serta melakukan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat setempat. Dari hasil penelitian tersebut, beliau langsung mengambil kesimpulan bahwa kampungnya diberi nama Eka Sapta. Eka berarti satu dan Sapta berarti tujuh yang berarti satu tujuan, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancaranya kepada masyarakat yaitu "Ingin Merubah Nasib". Selesai menetapkan nama desa tersebut maka Pran Liberin mulai melakukan pemilihan kepala kampung pertama.

Keadaan Demografi Desa Eka Sapta Kab. Berau jika dilihat dari jumlah penduduk. Jumlah penduduknya pada tahun 2015 tercatat sebanyak 922 jiwa. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 509 jiwa atau 15,1% dan jenis perempuan sebanyak 409 jiwa atau 14,1%.



Tabel 4.2
Klasifikasi Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	509	15,1%
2	Perempuan	409	14,1%
Total		922	100%

Sumber : Kantor Desa Eka Sapta Kec. Talisayan Kab. Berau Dalam Angka 2015.

2. Pendidikan Masyarakat Desa Eka Sapta

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan, dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika sosial dan pola sosial individu, selain itu dapat mempermudah memperoleh informasi yang lebih maju.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Eka Sapta digolongkan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pada tingkat pendidikan formal jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SD sebanyak 44 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SMP/SLTP sebanyak 129 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SMA/SLTA sebanyak 34 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir D1-D3 sebanyak 4 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir S1-S3 sebanyak 4

orang, dan 243 orang masih dalam tahap sekolah, sedangkan anak-anak yang masih belum sekolah sebanyak 56 orang, selebihnya yang tidak tamat SD sebanyak 373 orang.

Tabel 4.3
Klasifikasi Pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	Tidak tamat SD	373
2	Tamat SD	44
3	Tamat SMP/SLTP	129
4	Tamat SMA/SLTA	34
5	D1-D3	4
6	S1-S3	4
7	Tahap sekolah	243
8	Belum sekolah	56

Sumber : Kantor Desa Eka Sapta Kec. Talisayan Kab. Berau Dalam Angka 2015.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Eka Sapta berpendidikan akhir SD yang jumlahnya 44 orang. Dari banyaknya masyarakat yang berpendidikan akhir SD maka masyarakat Desa Eka Sapta tergolong masyarakat yang mempunyai SDM yang kurang baik. Selain pendidikan formal, masyarakat Desa Eka Sapta juga ada yang berpendidikan non formal. Seperti mengaji diniyah.

Di Desa Eka Sapta terdapat beberapa sarana pendidikan, baik sarana pendidikan formal maupun non formal. Sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah TK sebanyak 1 gedung, SD sebanyak 1 gedung, SMP sebanyak 1 gedung, SMA sebanyak 1 gedung,. Sedangkan pendidikan non formal ada gedung podok pengajian terdapat 3 gedung.

3. Perekonomian Masyarakat Desa Eka Sapta

Masyarakat Desa Eka Sapta memiliki bermacam-macam pekerjaan, ada yang bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, PNS, Karyawan Swasta, Guru, Pedagang, Pensiunan, Nelayan, Wiraswasta, dan lain-lain.

Tetapi sebagian besar masyarakat Desa Eka Sapta bekerja sebagai petani/pekebun yang berjumlah 210 orang, sebagian dari mereka ada juga yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 9 orang, bekerja sebagai PNS sebanyak 20 orang, bekerja sebagai pedagang sebanyak 10 orang, bekerja sebagai buruh tani sebanyak 3 orang. Dan masih banyak lagi berbagai macam pekerjaan yang lain.

Tabel 4.4
Klasifikasi Berdasarkan pekerjaan

No	Jenis	Jumlah
1	Petani/pekebun	210
2	Wiraswasta	9
3	Buruh Tani	3
4	Pedagang	10
5	PNS	20

Sumber : Kantor Desa Eka Sapta Kec. Talisayan Kab. Berau Dalam Angka 2015.

Dengan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani/pekebun, keadaan perekonomian masyarakat Desa Eka Sapta bisa dikatakan menengah kebawah. Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Eka Sapta yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan mejadi salah satu usaha untuk meigkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Kondisi Sosial Desa Eka Sapta

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Eka Sapta dikenal sebagai masyarakat yang suka bermusyawarah. Baik masalah desa, masyarakat maupun masalah pribadi. Selain itu, mereka juga merupakan masyarakat yang ramah, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Sikap ini terlihat dari aktifitas mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di Desa Eka Sapta baik dalam segi sosial seperti kerja bakti, perbaikan jalan desa, makam, sekolah maupun dari segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, perkawinan, ta'ziah, dan lain-lain.

5. Kondisi Keagamaan Desa Eka Sapta

Penduduk Desa Eka Sapta mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dari 614 jiwa islam mejadi satu-satunya agama dengan angka tertinggi yang ada di desa ini yakni sebesar 96% beragama islam sedangkan agama kristen terlihat 4 jiwa dengan angka terendah yakni 4%. Hal ini dikeranakan perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak cucu dan semakin banyak transmigrasi yang berdatangan. Di Desa Eka Sapta terdapat sarana untuk beribadah diantaranya adalah Masjid sebanyak 3 buah, dan gereja sebanyak 1 buah.

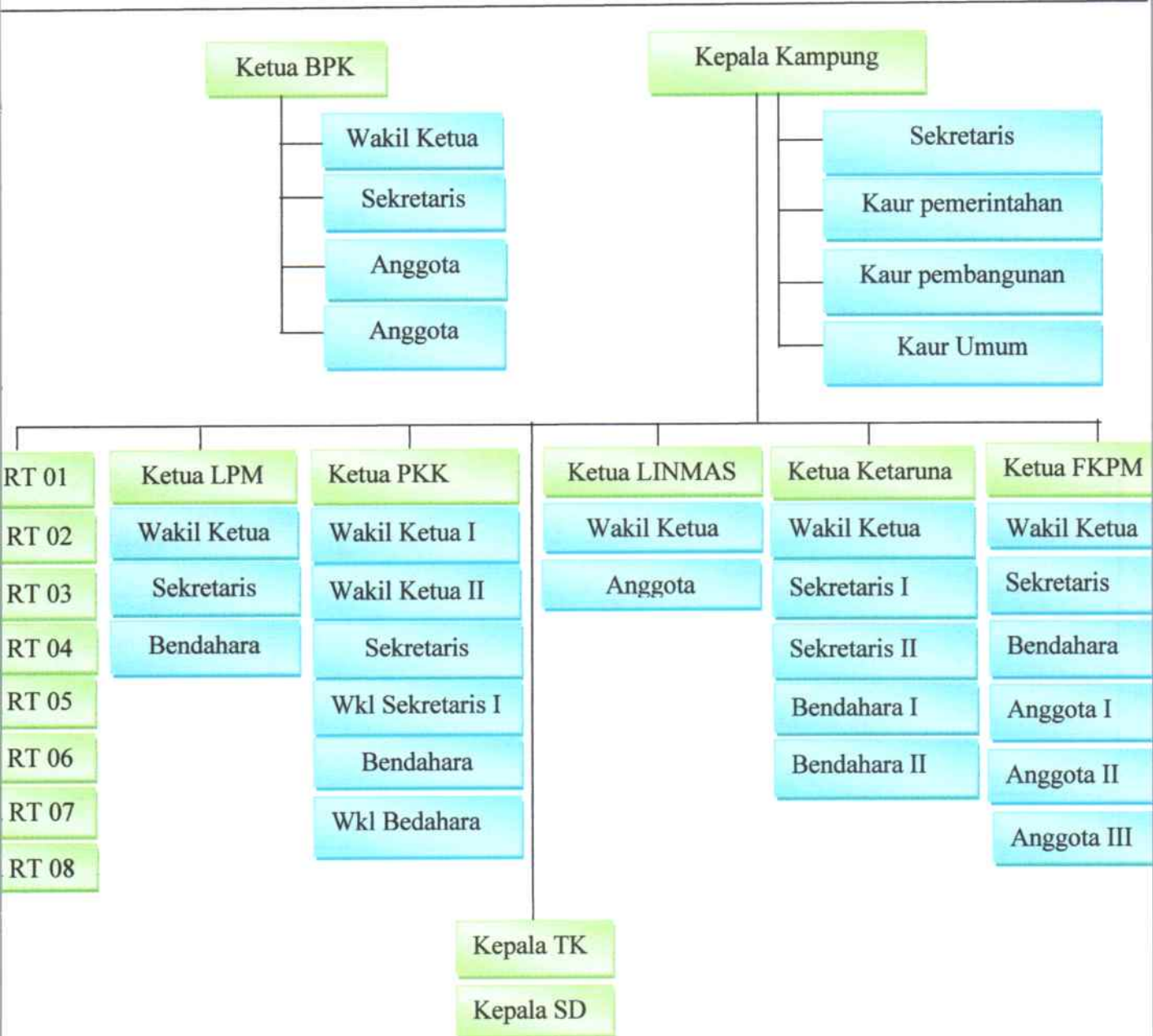
Tabel 4.5
Tempat Ibadah

No	Jenis	Jumlah
1	Masjid	3
2	Gereja	1

Sumber : Kantor Desa Eka Sapta Kec. Talisayan Kab. Berau Dalam Angka 2015.

Jika ditinjau dari segi keagamaan, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Eka Sapta mayoritas beragama Islam dan sebagian besar bermazdhab Syafi'i dan masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama' (NU). Bila ditinjau dari aktifitas keagamaan dapat dikatakan bahwa mayoritas keislaman penduduk Desa Eka Sapta sangat kuat. Terbukti dengan antusiasnya mereka mengikuti berbagai aktifitas keagamaan baik berupa kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, syiar Islam di Desa Eka Sapta menjadi semakin semarak.

Gambar 4.2
STRUKTUR ORGANISASI KP. EKA SAPTA
KEC. TALISAYAN



Sumber : Kantor Desa Eka Sapta 2015

1. Sekretaris Desa

- a. Membantu kepala desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis dan penyusunan serta pengurusan administrasi umum yang meliputi ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, kepastakaan, kehumasan, protokol dan rumah tangga.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa barfungsi :
 - 1) Pengumpulan analisis dan penyajian data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas kepala urusan dan kepala-kepala dusun serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program serta pengurusan administrasi umum. Yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kepastakaan, kehumasan protokol dan rumah tangga.
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Kepala Urusan Ekonomi Dan Keuangan

- a. Membantu sekdes (sekretaris desa) dalam penyiapan bahan perumusan, program kegiatan pemerintahan desa.
- b. Kaur ekonomi dan keungan mempunyai fungsi
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan keuangan desa perpajakan retribusi dan pendapatan desa.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian masyarakat koperasi dan perindustrian.



- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan penyusunan perubahan dan perhitungan APB Desa.
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
3. Kepala Urusan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Kaur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan kegiatan.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
4. Seksi Pertanian Dan Pengairan
- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa di bidang pertanian dan pengairan.
 - b. Seksi pertanian dan pengairan mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan dan budidaya pertanian, pengairan dan pembinaan usaha tani.
 - 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa di bidang ketentraman dan ketertiban

- b. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, di bidang LINMAS, penanggulangan bencana dan pembinaan peran serta masyarakat dalam ketertiban.
 - 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- 6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa dibidang kesejahteraan masyarakat
 - b. Seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan teknis dalam pengetasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, perkawinan dan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- 7. Kepala Dusun
 - a. Membantu kepala desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di dusun.
 - b. Kepala dusun mempunyai fungsi :
 - 1) Pelayanan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tugas Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Desa Eka Sapta

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas Kepala Desa Eka Sapta dalam pemerintahan begitu luas dan kompleks yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat desa juga demikian adanya, karena perangkat desa adalah merupakan salah satu unsur pemerintahan dalam desa. Kepala desa dan perangkat desa Eka Sapta dalam penyelenggaraan urusan desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pemerintah Desa Eka Sapta bertanggung jawab atas seluruh kehidupan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Kepala Desa Eka Sapta bertugas menetapkan peraturan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan perekonomian desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tidak terbatas pada tugas di atas. Kepala Desa Eka Sapta juga memiliki kekuasaan sekaligus kewajiban untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Eka Sapta, memanfaatkan teknologi tepat guna yang ada di desa, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atas perkara hukum atas desa, serta melaksanakan kewenangan lain yang oleh ketentuan perundangan diberikan kepada desa.

Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa Eka Sapta adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.



a. Menetapkan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005), dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dengan demikian maka Peraturan Desa Eka Sapta harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Tabel 4.6

Tanggapan responden tentang penetapan peraturan desa

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	21	20,66%	31	1,00
Baik	4	43	67,22%	57	2,00
Cukup baik	3	0	0	0	0
Kurang baik	2	8	12,12%	16	0,20
Sangat tidak baik	1	0	0	0	0
Jumlah		72	100	104	3,2

Sumber : hasil obsevasi 2015

$$\text{Skor} = \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{[(0 \times 1) + (8 \times 2) + (0 \times 3) + (43 \times 4) + (21 \times 5)]}{72} \\
&= \frac{0 + 16 + 0 + 57 + 31}{72} \\
&= \frac{104}{72} = 1,44
\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil kinerja Kepala Desa Eka Saptia dalam menetapkan peraturan desa sebanyak 21 orang atau 20,66% responden menjawab dengan sangat baik. Sebanyak 43 orang atau 67,22% responden menjawab dengan baik. Sebanyak 8 orang atau 12,12% responden menjawab dengan kurang baik. Dan responden tidak menjawab tidak baik sebanyak 0 orang atau 0%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“sebelum saya menetapkan peraturan desa, saya melakukan survey dalam kampung agar peraturan yang saya buat selalu tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat disini.”

Hasil wawancara penulis dengan sekretaris Desa yang bernama Nuri Jauhari pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“Selama ini peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa tidak pernah bertentangan dengan masyarakat karena kepala desa hampir setiap hari jalan-jalan kerumah warga sekaligus mensurvei kekurangan dalam desa.”

Hasil wawancara penulis dengan ketua BPD yang bernama Gabriel pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“saya selalu setuju dengan keputusan kepala desa dalam menetapkan suatu peraturan demi kesejahteraan masyarakat, sebab kepala desa rajin mengontrol serta melakukan perundingan kembali bersama aparaturnya pemerintahan desa.”

Hasil wawancara penulis dengan ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“menurut saya peraturan kepala desa sudah baik, selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selama ini tidak ada masyarakat yang pro kontra dengan peraturan desa.”

Hasil wawancara penulis dengan ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“peraturan desa selama ini selalu baik. karena sebelum kepala desa menetapkan suatu peraturan beliau buat musyawarah dengan seluruh aparaturnya desa dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.”

Hasil wawancara penulis dengan ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa selalu mengeluarkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Hasil wawancara penulis dengan ketua LINMAS pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa sudah baik, karena sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan desa.”

Hasil wawancara penulis dengan ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“saya selalu setuju dengan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa sebab peraturan itu sesuai dengan hasil musyawarah, apalagi menyangkut kepentingan masyarakat selalu sangat baik,”

Hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah TK pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“dalam penetapan peraturan desa oleh kepala desa sudah baik karena selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.”

Hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah SD pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“peraturan kepala desa selalu baik. kami disini selalu diperhatikan, apabila ada kekurangan desa atau masyarakat maka secepatnya dibuatkan suatu peraturan dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah.”

Hasil pengamatan penulis bahwa benar Kepala Desa Eka Sapta selalu melakukan pengontrolan dalam desa untuk merumuskan sejumlah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau kekurangan-kekurangan dalam desa sehingga dapat dirumuskan dalam peraturan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih memperbaiki desanya. Jadi dalam hal ini kinerja Kepala Desa Eka sapta lebih ditingkatkan lagi agar peraturan desa lebih merata dan lebih ditegakan dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, efektif dan efisien.

b. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Dana desa adalah amanah yang harus dikelola untuk menggerakkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa yang menerima anggaran itu diharapkan dapat mencermati dan memahami secara tepat prioritas penggunaan dana desa. Sebagaimana telah diatur dalam Permen Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Salah satu program diprioritaskan adalah *capacity building* atau peningkatan kapasitas masyarakat desa, ini sangat mendesak dan sifatnya prioritas, karena peningkatan kapasitas inilah yang akan menjadikan masyarakat desa lebih berdaya, memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan atau skill yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kepala Desa agar melakukan *capacity building* khususnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa sehingga dana desa benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga dalam penggunaan dana desa nantinya tidak timbul masalah hukum di kemudian hari.

Tabel 4.7

Tanggapan responden tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	20	20%	30	1,00
Baik	4	47	75,58%	75	3,00
Cukup baik	3	0	0	0	0
Kurang baik	2	5	4,42%	5	0,20
Sangat tidak baik	1	0	0	0	0
Jumlah		72	100	110	4,2

Sumber : hasil olahan observasi 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
 &= \frac{[(0 \times 1) + (5 \times 2) + (0 \times 3) + (47 \times 4) + (20 \times 5)]}{72} \\
 &= \frac{0+5+0+75+30}{72} \\
 &= \frac{110}{72} = 1,57
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa hasil kinerja Kepala Desa Eka Saptu dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebanyak 20 orang atau 20% responden menjawab dengan sangat baik. Sebanyak 47 orang atau 75,58% responden menjawab dengan baik. Sebanyak 5 orang atau 4,42% responden menjawab dengan kurang baik. Dan sebanyak 0 orang atau 0% responden menjawab dengan tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“dana desa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, setiap dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah diprogramkan dengan baik sehingga tidak bisa saya korupsi karena sudah dipos-poskan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa yang bernama Nuru Jauhari pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“keuangan desa yang dipegang dan dikelola oleh kepala desa dan aparatu desa telah direalisasikan dalam hal pembangunan, pertanian dan kemasyarakatan. Uang desa telah dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak ada yang korupsi.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD yang bernama Gabriel pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa telah kelolah keuangan desa dengan baik sehingga telah terlihat perekonomian masyarakat telah meningkat, karena kepala desa ini lebih mengutamakan perekonomian masyarakat dibidang pertanian.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“keuangan desa selalu dikelola sesuai dengan program kerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Kepala desa selalu transparansi dalam memegang keuangan desa miliaran rupiah.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“menurut saya dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik karena kepala desa sudah mulai melengkapi sarana dan prasarana desa sesuai dengan program kerjanya.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik, sudah sesuai dengan program kerja kepala desa.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua LINMAS pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“setiap hari kepala desa selalu jalankan program kerjanya, itu berarti pengelolaan keuangan desa sudah baik dan terprogram.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“dalam pengelolaan keuangan desa sudah lumayan baik. karena saya lihat desa ini sudah banyak bangunan-bangunan yang didirikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah TK pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“saya kurang tau tentang pengelolaan keuangan desa karena itu urusan para pemerintah desa dan saya cuman tau mengajar dan digaji oleh yayasan.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah SD pada

tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“saya tidak tau anggaran desa per tahun itu berapa tapi menurut saya dalam pengelolaannya sudah lumayan baik sebab desa ini sudah berkembang, itu berarti pengelolaan keuangannya juga sudah baik.”

Hasil pengamatan penulis bahwa benar kepala desa telah gunakan semua anggaran desa dengan baik. Kepala desa menggunakan semua anggaran dalam hal-hal yang produktif untuk kepentingan masyarakat. Dalam tahun 2015 ini Kepala Desa Eka Sapta telah menerima anggaran desa dalam cartuwulan pertama sebesar Rp 700 Juta dan 200 Juta dari pemerintah untuk digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah desa, entah itu dalam pembangunan maupun dalam kegiatan desa dan kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari kemajuan perekonomian desa dalam bidang pertanian, disamping itu Desa Eka Sapta selalu menang setiap tahun dalam perlombaan antar desa dalam pertandingan desa yang terindah dan maju dalam tingkat Kecamatan Talisayan sehingga telah memungut beberapa piagam dari tahun 2011 sampai sekarang. Hal ini telah terbukti bahwa kinerja kepala desa dalam mengelolah keuangan desa telah maksimal. Apabila dana desa dari pemerintah daerah tidak dihabiskan oleh pemerintah desa dalam urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dana tersebut akan dikembalikan ke APBD dan dianggap kepala desa tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kepala desa selalu transparan dalam pengelolaan anggaran desa kepada BPD dan para masyarakat. Hal ini terlihat pada hasil rapat desa dengan masyarakat yang selalu membahas tentang anggaran desa yang masuk dan yang akan direalisasikan keprogram-program kerja kepala desa dalam masa

jabatannya yang telah dirumuskan bersama.

c. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa

Dalam mengembangkan perekonomian Desa Eka Sapta yang paling mendasar dihadapi dalam pembangunan desa adalah adanya tingkat pengangguran dan muaranya adalah penduduk miskin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Desa Eka Sapta menggerakkan sektor perekonomian desa dengan memperluas dan memperjelaskan akses masyarakat ke sumber-sumber daya yang produktif seperti : prasarana sosial ekonomi (pasar-pasar tradisional, modern) permodalan, informasi dan teknologi.

Adapun Kepala Desa Eka Sapta dalam membina perekonomian Desa adalah sebaagai berikut;

1. Kepala Desa mampu mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD).
2. Kepala Desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
3. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
4. Kepala Desa mampu mengarahkan kondisi geografis desa sebagai lahan pertanian.

Tabel 4.8

**Tanggapan responden tentang pembinaan Dan peningkatan Perekonomian
Desa**

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	36	50,66%	76	2,00
Baik	4	24	29,44%	54	1,00
Cukup baik	3	0	0	0	0
Kurang baik	2	12	19,9%	29	0,20
Sangat tidak baik	1	0	0	0	0
Jumlah		72	100	159	3,2

Sumber : hasil observasi 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
 &= \frac{[(0 \times 1) + (12 \times 2) + (0 \times 3) + (24 \times 4) + (36 \times 5)]}{72} \\
 &= \frac{0 + 29 + 0 + 54 + 76}{72} \\
 &= \frac{159}{72} = 1,44
 \end{aligned}$$



Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa kinerja kepala desa dalam pembinaan dan peningkatan perekonomian di Desa Eka Sapta sebanyak 36 orang atau 50,66% responden menjawab dengan sangat baik. Sebanyak 24 orang atau 29,44% responden menjawab dengan baik. Sebanyak 12 orang atau 19,9% responden menjawab dengan kurang baik. Sebanyak 0 orang atau 0% tidak menjawab.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan

sebagai berikut :

“saya sadari kekurangan saya dalam meningkatkan perekonomian desa masih belum baik, anggaran desa ini masih mengharapkan bantuan dari pemerintah belum ada pendapatan asli desa contohnya belum ada pemungutan pajak desa.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa yang bernama Nuri Jauhari pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“perekonomian desa ini sudah baik, tapi hanya saja pendapatan asli desa yang belum ada. Kami sudah menyiapkan lahan pertanian untuk meningkatkan perekonomian dibidang perkebunan dan pertanian.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD yang bernama Gabriel pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“perekonomian desa kami telah bagus. Hal ini telah terbukti bahwa desa kami dijuluki dengan nama desa jagung. Yang jadi fokus utama kepala desa adalah meningkatkan perekonomian dibidang pertanian dan perkebunan.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“ekonomi desa ini sudah baik karena masyarakat sebagian besar pekerjaannya adalah petani jadi, masalah ekonomi sudah baik.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa selalu meningkatkan perekonomian desa dan perekonomian masyarakat dibidang pertanian dan perdagangan. Desa ini maju kalau dibidang perekonomian.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa selalu konsentrasi dibidang peretanian, perekonomian dan pembangunan masyarakat dan desa. Hal ini kepala desa selalu melakukan peningkatan perekonomian disegala bidang.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LINMAS pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“perekonomian desa ini sudah baik. kepala desa kami ini orangnya selalu mau mensejahterakan masyarakatnya dibidang perekonomian, pertanian dan pembangunan.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“desa kami adalah desa berkembang kearah lebih maju lagi karena perekonomiannya sudah bagus. Kepala desa sudah membangun pasar rakyat untuk peningkatan perekonomian desa dan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah TK pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“tugas kepala desa ini dalam meningkatkan perekonomian desa sudah lumayan baik. hal ini terlihat dari berkembangnya desa ini dari dulu sampai sekarang sudah banyak perubahan.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD yang pada tanggal 24 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa sudah meningkatkan perekonomian dalam desa dan hasilnya sudah terlihat dari berbagai kesuksesan desan dibidang pertanian.”

Hasil pengamatan penulis bahwa kinerja Kepala Desa Eka Sapta dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan perekonomian desa belum cukup baik karena belum ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa adalah salah satu unsur dalam meningkatkan perekonomian desa. Desa Eka Sapta masih mengharapkan dana dari pemerintah sehingga desa ini masih dalam ketergantungan dana. Semua desa di Kecamatan Talisayan telah memberlakukan pajak desanya hanya terkecuali Desa Eka Sapta yang belum melaksanakan pajak desa disebabkan pendapatan masyarakat desa belum maksimal. Kepala desa masih menunggu dua tahun lagi sampai masyarakat benar-benar berhasil dalam perekonomian rumah tangganya baru diberlakukan pajak desa agar bisa seimbang dengan penghasilan perekonomian masyarakat desa.

Maka dari itu kinerja Kepala Desa harus ditingkatkan agar bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam desa yang lain untuk dijadikan pendapatan asli desa agar tidak terlalu ketergantungan dana dari pemerintah. Desa Eka Sapta harus mampu mengelolah desanya sendiri yang sesuai dengan amanah dari undang-undang otonomi daerah.

2. Tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Eka Sapta

Salah satu cara yang penting untuk dapat memaksimalkan pembangunan di Desa Eka Sapta yaitu dengan kepemimpinan kepala desa dalam memotivasi, menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini tugas kepala desa dapat berfungsi sebagai pemotivator dan motor penggerak dalam membangkitkan semangat masyarakat dalam pembangunan desanya, kepala desa menjalankan tugasnya sehari dapat dikatakan sebagai pemimpin formal, yaitu Pemimpin formal yang melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa, merupakan tugas sebagai agen pembangunan di desa.

Tugas Kepala Desa Eka Sapta dalam pembangunan desa adalah menjalankan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kepala Desa Eka Sapta memfokuskan diri dalam pembangunan jangka panjang yaitu pembangunan jalan, pembangunan listrik dan pembangunan pertanian desa.

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran

warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.

a. Pembangunan Jalan Desa

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Pembangunan Perbaikan jalan dilakukan dengan penyemiran (menambal aspal yang terkelupas), pengaspalan, dan rabat jalan. Program perbaikan jalan ini bertujuan untuk memperlancar akses transportasi antar desa di Eka Sapta. Adapun pembiayaan dari pembangunan infrastruktur jalan ini berasal dari anggaran desa dan swadaya warga. di Dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jalan, warga Eka Sapta turut terlibat aktif baik dalam perencanaan, pengerjaan dan

pengawasan. Dengan adanya program pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa Eka Sapta, kini mayoritas jalan di Eka Sapta berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga akses transportasi antar desa kurang relatif lancar. Selain jalan desa, program perbaikan infrastruktur di Eka Sapta juga mencakup perbaikan jalan di gang-gang kecil. gang-gang sempit yang dulu berupa tanah kini telah dirabat, sehingga tampak lebih bersih.

Tabel 4.9
Tanggapan responden tentang pembangunan jalan desa

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	0	0	0	0
Baik	4	9	6,50%	10	0,10
Cukup baik	3	0	0	0	0
Kurang baik	2	39	69,55%	55	3,00
Sangat tidak baik	1	24	24%	32	1,00
Jumlah		72	100	97	4,10

Sumber : hasil observasi 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
 &= \frac{[(24 \times 1) + (39 \times 2) + (0 \times 3) + (9 \times 4) + (0 \times 5)]}{72} \\
 &= \frac{32 + 55 + 0 + 10 + 0}{72} \\
 &= \frac{97}{72} = 1,34
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui hasil kinerja Kepala Desa Eka Sapta dalam pembangunan jalan sebanyak 0 orang atau 0% tidak ada yang menjawab sangat baik. Sebanyak 9 orang atau 6,50% responden menjawab dengan baik.

Sebanyak 39 orang atau 69,55% responden menjawab dengan kurang baik.

Sebanyak 24 orang atau 24% responden menjawab dengan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“jalan di desa ini masih kurang bagus, sudah beberapa kali saya ajukan ke pemerintah daerah tapi belum ada tanggapan balik. Anggaran desa tidak bisa sepenuhnya direalisasikan di pembangunan jalan karena anggaran desa sudah terprogram langsung dari pemerintah. Pembangunan jalan memakan anggaran sebesar 100 juta per kilo.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa yang bernama Nuri Jauhari pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kami belum memperbaiki jalan di desa ini pakai aspal karena masih tunggu tanggapan balik dari pemerintah daerah. Minimnya anggaran untuk pembangunan membuat kami sulit untuk memperbaiki jalan pakai aspal.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD yang bernama Gabriel pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“berdasarkan rapat kami bersama kepala desa dan aratur desa mengenai anggran desa dari pemerintah bahwa, memang benar anggaran desa sudah diprogramkan untuk pembangunan tapi bukan semuanya untuk pembangunan jalan, karena masih ada pembangunan-pembangunan yang harus diselesaikan dalam bulan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan belum baik, karena jalanan masih berbatuan belum diaspal. Masih berlubang-lubang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kalau menurut saya pembangunan jalan masih buruk sebab pemerintah desa hanya menjanjikan-janji masyarakat dengan jalanan yang bagus, kenyataanya sampai sekarang belum ada.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“jalanan didesa ini belum terlalu bagus karena belum diaspal, tapi secara perlahan-lahan kepala desa akan tetap memperbaiki jalanan sebagai sarana masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LINMAS pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“jalanan didesa ini masih jelek karena masih berbatuan dan sekarang masih dalam tahap perbaikan, tapi belum bisa diaspal sebab mungkin butuh anggaran yang besar.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“pambangunan jalan di desa ini belum baik karena pemerintah desa membutuhkan dana yang besar untuk memperbaiki jalanan menjadi jalan aspal bukan jalan berbatuan.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah TK pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa.

Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa sudah berusaha untuk memperbaiki jalanan yang rusak tapi bukan cuman tenaga yang dibutuhkan tapi anggaran yang besar dibutuhkan dan saya percaya sama kepala desa ini dalam menjalankan tugas-tugasnya.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan desa.

Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“saya selalu mengerti posisinya pak desa, tidak mungkin mau jalankan semua tugas-tugasnya dalam satu tahun. Masalah pembangunan jalan tidak bisa diselesaikan secepatnya karena butuh anggaran yang besar.”

Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Eka Sapta bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan jalan masih kurang baik. Hal ini terlihat dari jalanan yang masih rusak dan berbatuan. Jalanan aspal yang ada di Desa Eka Sapta panjangnya hanya 1 km karena ini hanya pemberian dari Bupati Berau. Faktor penyebabnya adalah kurangnya anggaran pemerintah untuk pembangunan jalan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya kesadaran dari perusahaan-perusahaan swasta seperti perusahaan kelapa sawit akan memperbaiki jalanan yang rusak sementara biaya untuk memperbaiki jalanan pakai aspal mencapai 100 juta per kilo meter, hal ini disebabkan karena jarak yang sangat jauh antara kota kabupaten dan desa eka sapta. Pemerintah Desa Eka Sapta menargetkan tahun depan baru mulai memperbaiki jalanan karena di tahun ini masih fokus ke masalah pertanian dan kemasyarakatan.

b. Pembangunan Listrik

Rencana pembangunan listrik pedesaan di Kabupaten Berau terus bergulir seiring dengan upaya peningkatan rasio elektrifikasi di provinsi Kalimantan Timur. Kini, listrik belum terlalu menjangkau di desa-desa. Melistriki suatu daerah terpencil memang bukan hal mudah, pekerjaannya tergolong cukup sulit dan penuh tantangan. Namun dengan tekad menerangi sampai ke pelosok negeri, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur selalu merealisasikan harapan masyarakat di desa daerah terpencil untuk segera menikmati listrik.

Proses pekerjaan pembangunan jaringan distribusi listrik untuk desa ini berlangsung selama setiap hari. Suatu upaya percepatan yang dilakukan PLN Kaltim. Dengan masuknya listrik ke Desa, masyarakat sudah bisa merasakan nikmatnya menggunakan listrik yang saat ini sudah menjadi kebutuhan utama. Harapan Bupati Berau, perekonomian masyarakat desa akan semakin maju dan berkembang. Kedepan, PLN berharap, listrik akan mampu menjangkau lebih banyak desa-desa tertinggal melalui program Listrik Pedesaan agar seluruh pelosok nusantara menjadi terang benderang.

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang pembangunan listrik

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	0	0	0	0
Baik	4	0	0	0	0
Cukup baik	3	22	26%	25	1,00
Kurang baik	2	21	24%	25	1.00
Sangat tidak baik	1	29	48,01%	49	2.00
Jumlah		72	100	99	3,00

Sumber : hasil observasi 2015

$$\begin{aligned}
\text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
&= \frac{[(29 \times 1) + (21 \times 2) + (22 \times 3) + (0 \times 4) + (0 \times 5)]}{72} \\
&= \frac{49 + 25 + 25 + 0 + 0}{72} \\
&= \frac{99}{72} = 1,37
\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa kinerja Kepala Desa Eka Saptadalam pembangunan listrik sebanyak 0 orang atau 0% tidak menjawab sangat baik. Sebanyak 0 orang atau 0% tidak menjawab baik. Sebanyak 22 orang atau 26% responden menjawab dengan cukup baik. Dan sebanyak 21 orang atau 24% responden menjawab dengan kurang baik dan sebanyak 29 orang atau 48,01% responden menjawab sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“di desa ini belum ada listrik, masyarakat masih memakai mesin pribadi atau aki untuk penerangan dimalam hari. Saya sudah ajukan di pemerintah daerah tapi masih dalam proses insya allah tahun depan di desa ini sudah tersentuh listrik.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa yang bernama Nuri Jauhari pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kami sudah usahakan tahun ini listrik masuk dalam desa tapi ternyata belum juga karena msih dalam proses. Tapi kami jamin tahun depan desa ini sudah ada listrik karena pemasangan listrik berkelanjutan dari desa tetangga baru sampai di desa ini.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD yang bernama Gabriel pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“masyarakat disini belum merasakan listrik dari pemerintah, mereka masih memakai mesin pribadi. Kepala desa sudah berusaha untuk listrik masuk desa tapi masih dalam proses sebab pemasangan listrik butuh antrean, tapi tahun depan listrik sudah ada.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“listrik belum masuk di desa ini, kabarnya akhir tahun ini atau tahun depan sudah mulai pemasangan tiang listriknya. Kepala desa sudah berusaha tapi belum ada kepastiannya.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik sudah baik tapi respon dari pemerintah yang terlambat untuk listrik masuk desa. Kepala desa sudah mengupayakan untuk secepatnya listrik masuk di desa ini.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“pembangunan listrik masih di upayakan agar secepatnya masyarakat menikmati listrik di desa ini. kepala desa sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih tunggu antrian dari desa ke desa.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LINMAS pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa.

Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa sudah sangat berupaya untuk pembangunan listrik tapi ternyata masih tunggu antrian dari desa ke desa untuk sampai di desa ini. kepala desa sudah mengusulkan agar secepatnya listrik masuk desa tapi harus bersabar lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“masyarakat belum dapat kepastian kapan listrik masuk didesa ini karena sudah menunggu bertahun-tahun sampai hari ini belum ada juga. Kepala desa sudah mengupayakan tapi masih belum ada kepastiaanya juga.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah TK pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa.

Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“pembangunan listrik belum ada. Masyarakat disini masih pakai listrik sendiri, pemerintah desa belum bisa memastikan kapan listrik masuk tapi sudah diupayakan agar secepatnya desa ini tersentuh oleh listrik agar tidak menjadi desa terbelakang.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan listrik desa.

Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kalau masalah tugas kepala desa, beliau sudah jalankan dengan baik hanya saja respon balik dari pemerintah yang lama sehingga ini akan menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan tugasnya.”

Berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang kinerja kepala desa Eka Sapta tentang pembangunan listrik belum baik, hal ini membuat masyarakat merasa resah karena selama ini desanya gelap dimalam hari. Pemerintah desa

dalam hal ini kepala desa telah berusaha agar secepatnya pembangunan listrik masuk di desa tapi harus menunggu antrean sebab pemasangan listrik berkelanjutan mulai dari kecamatan sampai ke desa-desa. Listrik di Desa Eka Sapta adalah tanggungan pemerintah daerah dan desa, anggarannya separuh dari APBN, APBD dan ADD.

c. Pembangunan Pertanian Desa

Hubungan antara pembangunan pertanian dan kesejahteraan pedesaan merupakan proses timbal balik, yang satu mempengaruhi yang lain. Meskipun masing-masing memerlukan program tersendiri tetapi beberapa program pedesaan sekaligus dapat bermanfaat bagi kedua-duanya. Kesejahteraan pedesaan yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat kepuasan bagi penduduk pedesaan. Ini berarti meningkatnya kualitas kehidupan pedesaan dan tidak berarti semata-mata sumbangan yang menyenangkan bagi masyarakat pedesaan dari pihak luar.

Setiap perekonomian pertanian sangat jalin-menjalin dengan seluruh kebudayaan dipedesaan, suatu cara hidup menyeluruh dipedesaan dengan struktur sosialnya, adat istiadatnya, nilai-nilai dan sikap-sikap pribadinya. Produksi hanya merupakan satu aspek saja dari setiap kebudayaan dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari aspek lainnya. Beberapa ahli ekonomi mempunyai pendapat yang benar yaitu bahwa petani-petan dan bahkan juga petani subsistens, cukup rasional dalam arti bahwa mereka menggunakan sedapat mungkin sumber-sumber yang ada pada mereka untuk dapat mencapai yang mereka inginkan.

Tetapi tidak benar apabila karena itu lalu disimpulkan bahwa tujuan petani ialah hanya untuk memperoleh pendapatan bersih yang setinggi-tingginya saja.

Kebanyakan petani dimanapun mereka berada selalu dipengaruhi oleh orang-orang disekitarnya; mereka dipengaruhi oleh tradisi-tradisi dan nilai-nilai setempat meskipun didalam pertanian yang sudah komersil atau pertanian yang telah berorientasi pasar sekalipun. Pertanian tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh kebudayaan di pedesaan yang ada. Oleh sebab itu, program-program untuk merubah sifat-sifat kebudayaan dipedesaan dapat membantu dalam memajukan pembangunan pertanian. Jelaslah bahwa didalam berusaha bertani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, kita juga perlu menyadari bahwa tujuan-tujuan lain juga sangat penting bagi negara dan sebenarnya harus dicapai sekaligus.

Tabel 4.11

Tanggapan responden tentang pembangunan pertanian

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	21	27,10%	27	1.00
Baik	4	39	64,93%	69	3.00
Cukup baik	3	12	7,97%	19	0.73
Kurang baik	2	0	0	0	0
Sangat tidak baik	1	0	0	0	0
Jumlah		72	100	115	4,73

Sumber : hasil observasi 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
 &= \frac{[(0 \times 1) + (0 \times 2) + (12 \times 3) + (39 \times 4) + (21 \times 5)]}{72} \\
 &= \frac{0+0+19+69+27}{72}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kinerja kepala desa dalam bidang pertanian sudah sangat baik. kepala desa terlalu mengutamakan kepentingan para petani dan hasil tani dalam desa ini sebagai sumber perekonomian desa.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kinerja kepala desa dibidang pertanian sudah baik karena fokus utama kepala desa dalam melaksanakan tugasnya adalah bidang prtanian karena dilihat mayoritas penduduk desa ini pekerjaanya sebagai petani.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa sudah menjalankan tugasnya dibidang pertanian. Sekarang beliau fokus dibidang pembangunan jalan dan listrik.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LINMAS pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“pertanian didesa ini sudah sangat maju itu berarti kinerja kepala desa dalam bidang ini sudah bagus juga karena sudah ada hasilnya dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“dibidang ini kepala desa telah berhasil menjalankan tugasnya, semoga kedepannya lebih maju lagi pembangunan pertanian desa ini.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah TK pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“menurutku kepala desa sudah baik dalam melaksanakan tugasnya dibidang pertanian sebab selalu memberikan bantuan kepada para petani berupa pupuk dan lain-lain.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD pada tanggal 25 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian desa. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa kami selalu melaksanakan tugasnya dengan serius dan sudah diprogram-programkan dalam pelaksanaanya. Bidang pertanian ini sudah sangat baik.”

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian Desa Eka Sapta sudah baik, karena kepala desa selalu memperhatikan masyarakatnya dibidang pertanian dengan memberikan bantuan berupa pupuk dan alat-alat bertani kepada setiap kepala keluarga. Desa ini dijuluki sebagai desa jagung oleh Bupati Berau sebab keberhasilannya dalam pertanian dan selalu meningkatkan hasil-hasil produksi petani. Hal ini telah terbukti dalam keberhasilan kepala desa dalam pembangunan pertanian telah mendatangkan gubernur kalimantan timur untuk merayakan keberhasilan panen desa yang berupa jagung, padi, kelapa sawit dan lain-lain.

3. Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan Di Desa Eka Sapta

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Tugas Kepala Desa Eka Sapta dalam pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat pada bidang keagamaan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang hukum. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Diharapkan masyarakat yang mandiri tersebut secara bertahap dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri pula dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki empat unsur utama yang sekaligus dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilannya, yaitu aksesibilitas informasi, menyangkut seberapa mudah dan seberapa banyak masyarakat mampu mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan, lalu partisipasi atau keterlibatan, menyangkut siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Selain itu unsur lainnya adalah akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang mengatasnamakan masyarakat, serta kapasitas organisasi lokal, yaitu kemampuan bekerja sama, mengorganisir warga dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

a. Pemberdayaan masyarakat pada bidang agama

Pembangunan di bidang kehidupan keagamaan masyarakat Desa Eka Sapta selalu berjalan dengan baik jika masyarakat dalam kondisi damai dan rukun. Kerukunan umat beragama dalam masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan akan banyak mengalami gesekan antar individu dan kelompok sehingga perlu dilakukan pembinaan yang terprogram dengan baik dan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat di mana mereka memiliki norma dan nilai yang menjadi basis pandangan hidup mereka sebagai kearifan lokal.

Untuk mendukung program pembinaan kerukunan umat beragama dilandasi oleh kemampuan mengendalikan diri yang bersumber pada konsep isin (malu) melakukan perbuatan buruk kepada sesama (social value) dan konsep walat yang merupakan nilai religius (religious value) yang menjadi identitas kelompok pada komunitas Tengger. Interaksi antar individu dan kelompok dilandasi oleh konsep gentenan (bergantian) dalam melakukan aktivitas kemasyarakatan, sehingga semua saling terikat oleh konsensus untuk tetap saling bekerja sama, saling membantu, dan saling mendukung antar individu dan kelompok lain.

Masyarakat Eka Sapta yang berubah dari komunitas homogen menjadi beragam keyakinan masih tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal tersebut meskipun mereka telah memiliki identitas baru sebagai umat kristen dan Islam, sehingga harmoni di antara kedua kelompok tetap terjaga.



Tabel 4.12

**Tanggapan responden tentang pemberdayaan masyarakat
pada bidang keagamaan**

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	20	26%	25	1.00
Baik	4	32	60%	65	3.00
Cukup baik	3	17	14%	15	0.10
Kurang baik	2	0	0	0	0
Sangat tidak baik	1	0	0	0	0
Jumlah		72	100	105	4,10

Sumber : hasil observasi 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
 &= \frac{[(0 \times 1) + (0 \times 2) + (17 \times 3) + (32 \times 4) + (20 \times 5)]}{72} \\
 &= \frac{0+0+15+65+25}{72} \\
 &= \frac{105}{72} = 1,45
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4,12 diketahui bahwa dalam pembinaan masyarakat pada bidang agama sebanyak 20 orang atau 26% responden menjawab dengan sangat baik. Sebanyak 32 orang atau 60% responden menjawab dengan baik. Sebanyak 17 orang atau 14% responden menjawab dengan cukup baik dan tidak ada responden yang menjawab kurang baik dan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“di desa ini, kami selalu menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Di desa ini menganut dua agama yaitu kristen dan islam, kami selalu bekerja sama dalam memajukan desa ini.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa yang bernama Nuri Jauhari pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“setiap kali kami melakukan kegiatan, kami selalu tekankan kepada masyarakatan agar lebih menjaga kerukunan antar beragama agar lebih terciptanya keamanan dan kenyamanan di desa ini.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD yang bernama Gabriel pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“selama masa jabatan kepala desa ini, desa kami selalu rukun dan aman. Tidak pernah ada perkelahian antar pemuda atau antar agama. Karena kami selalu menjunjung tinggi kerukunan.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“didesa ini menganut multi agama dan kepala desa selalu menyatukan dan merukunkan kami walaupun beda agama. Kepala desa selalu menghadiri acara keagamaan di desa.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa selalu membina kami agar kerukunan agama tetap terjalin dengan baik. kepala desa sangat anti dengan perselisihan agama.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa selalu memberikan peringatan kepada masyarakat agar selalu mendalami ilmu agamanya masing-masing agar selalu menciptakan suasana yang baik dalam berkelompok masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LINMAS pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa ini selalu aktif dalam perayaan keagamaan. Dan selalu memberikan masukan kepada seluruh masyarakat agar selalu memperbaiki kerukunan antar umat beragama.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa selalu memperingatkan kepada masyarakat agar kegotong royongan dalam masyarakat selalu terjalin dengan baik, tanpa membeda-bedakan agama.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah TK pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kerukunan gama dalam desa ini sudah sangat baik. tidak pernah ada konflik agama dan masyarakatnya juga tingkat kesadarannya

tinggi. Kepala desa tidak pernah lupa untuk sering mengingatkan masyarakatnya agar tetap bersatu.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang agama. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“hubungan antar agama sangat baik tidak pernah ada konflik, dan kepala desa juga selalu aktif dalam perayaan keagamaan desa.”

Berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang kinerja Kepala Desa dalam bidang keagamaan di Desa Eka Sapta bahwa benar, desa ini selalu menjunjung tinggi kerukunan antar beragama, walaupun berbeda agama namun masyarakat Desa Eka Sapta selalu melakukan kegiatan-kegiatan bersama, bekerjasama dalam melakukan pekerjaan secara individual maupun secara kelompok. Di desa ini masyarakatnya menganut multi budaya, keyakinan, suku, ras dan bahasa, karena desa ini adalah desa transmigrasi yang masyarakatnya berasal dari pulau Sulawesi, Pulau Jawa, NTT, NTB, Madura dan lain-lain. Namun perbedaan inilah yang menyatukan mereka dalam satu desa yaitu Desa Eka Sapta yang artinya satu tujuan.

b. Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan

Pembinaan pada kesehatan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pemerintah Desa Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana system pengelolaan suatu program baik program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi maupun program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan.

Tabel 4.13
Tanggapan responden tentang pembinaan masyarakat
pada bidang kesehatan

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	0	0	0	0
Baik	4	14	25,12%	24	0,60
Cukup baik	3	39	43,73%	57	1.00
Kurang baik	2	19	31,15%	32	1.00
Sangat tidak baik	1	0	0	0	0
Jumlah		72	100	113	2,60

Sumber : hasil observasi 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
 &= \frac{[(0 \times 1) + (19 \times 2) + (39 \times 3) + (14 \times 4) + (0 \times 5)]}{72} \\
 &= \frac{0 + 32 + 57 + 24 + 0}{72} \\
 &= \frac{113}{72} = 1,56
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan di Desa Eka Sapta sebanyak tidak ada responden yang menjawab sangat baik. Sebanyak 14 orang atau 25,12% responden menjawab dengan baik. Sebanyak 39 orang atau 43,73% responden menjawab dengan cukup baik. Dan sebanyak 19 orang atau 31,15% responden menjawab dengan kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kami kurang melakukan pembinaan dalam bidang kesehatan. Hanya saja pembinaan kesehatan dilakukan dalam posyandu anak-anak dan apabila orang dewasa sakit lalu mereka ke mantri, suster atau bidan maka disitulah ada pembinaan bahwa pentingnya kesehatan harus dijaga dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa yang bernama Nuri Jauhari pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“tidak ada pembinaan di bidang kesehatan, desa kami hanya melakukan posyandu bagi balita dan anak-anak.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD yang bernama Gabriel pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“pembinaan dalam bidang kesehatan didesa ini belum pernah dilakukan. Masyarakat selalu sadar bahwa sehat itu penting dan sehat itu mahal.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa belum pernah mengadakan pembinaan kesehatan desa. Padahal ini juga sangat penting agar masyarakat tau cara menjaga kesehatannya.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“dalam bidang kesehatan hanya ada pembinaan kesehatan anak yang dilakukan dalam proses posyandu. Kalau untuk orang dewasa tidak pernah ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa masih mengupayakan agar bisa diadakan seminar kesehatan desa untuk lebih mengenal berbagai penyakit yang sering menyerang tubuh kita.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LINMAS pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“untuk pembinaan kesehatan desa belum pernah dilakukan didesa ini. harusnya kepala desa juga lebih memperhatikan kesehatan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kinerja kepala desa dibidang ini kurang bagus karena selama ini tidak pernah melakukan pembinaan kesehatan dari desa. Harusnya kepala desa lebih kreative lagi supaya masyarakat bisa sejahtera.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah TK pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“selama ini saya tidak pernah lihat ada pembinaan kesehatan didesa ini hanya saja masyarakat rutin melakukan posyandu anak dan balita demi kesehatannya.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang kesehatan. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“mungkin kepala desa masih upayakan agar pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan ini dilakukan tapi yang saya lihat selama ini tidak pernah ada.”

Menurut pengamatan penulis tentang kinerja Kepala Desa dalam bidang kesehatan di Desa Eka Saptta bahwa kepala desa dan aparatur desa belum pernah melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah desa selalu berpatokan bahwa di desa ini sudah melaksanakan posyandu untuk balita setiap bulan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dari pemerintah desa akan pentingnya kesehatan. Padahal kesehatan ini adalah salah satu langka untuk mensejahterkan masyarakat desa.

c. Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Hukum

Masyarakat kita semakin kritis, jeli dan memiliki kepekaan yang tinggi tentang masalah-masalah hukum, namun patut juga disadari bahwa sikap kritis tersebut, terkadang tidak didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara teoritis maupun dalam aplikasinya sehari-hari. Oleh sebab itu pembentukan dan pembinaan Desa Sadar hukum dapat menjadi salah satu solusi yang mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat di tanah air, terutama mereka yang berada pada kategori masyarakat yang kurang memahami hukum dan sering kali terabaikan.

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di lembaga-lembaga pemasyarakatan anak negara. Contoh pemuda berkumpul untuk mendiskusikan bahaya akibat narkoba, diberi penyuluhan akibat adanya perkelahian pelajar.

Tabel 4.14
Tanggapan responden tentang pemberdayaan masyarakat
pada bidang hukum

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	0	0	0	0
Baik	4	37	43,25%	40	2.00
Cukup baik	3	0	0	0	0
Kurang baik	2	23	38,50%	37	1.00
Sangat tidak baik	1	12	18,25%	35	0,90
Jumlah		72	100	112	3,9

Sumber : hasil obsevasi 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
 &= \frac{[(12 \times 1) + (23 \times 2) + (0 \times 3) + (37 \times 4) + (0 \times 5)]}{72} \\
 &= \frac{35 + 37 + 0 + 40 + 0}{72} \\
 &= \frac{112}{72} = 1,55
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pada bidang hukum sebanyak 0 atau responden tidak menjawab sangat baik. Sebanyak 37 orang atau 43,25% responden menjawab dengan baik. Sebanyak 23 orang atau 38,50% responden menjawab dengan kurang baik. Dan sebanyak 12 orang atau 18,25% responden menjawab sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kami sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kesadaran dalam hukum untuk membentengi diri dan memperbaiki diri. Apalagi para kaum lelaki agar jauhi narkoba dan sejenisnya supaya tidak bermasalah dan terjatuh dalam hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa yang bernama Nuri Jauhari pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kami selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya para kaum lelaki agar bersih dari barang-barang terlarang. Selalu membersihkan diri dalam hukum dan jangan pernah terseret hukum gara-gara perbuatan tercela.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD yang bernama Gabril pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“pemerintah desa sering melakukan sosialisasi tentang hukum. Pengalaman Sudah banyak orang yang diseret dalam hukum, maka kami didesa ini membina masyarakat agar jauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan yang merusak diri apalagi sampai masuk penjara.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“pembinaan Kepala desa dibidang hukum untuk masyarakat hampir tidak pernah dilakukan padahal ini juga penting agar masyarakat lebih tau tentang hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa tidak pernah melakukan pembinaan dibidang hukum. Pengetahuan masyarakat tentang huku masih sedikit dan ini perlu pengembangan ilmu.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa tidak pernah melakukan pembinaan dibidang hukum, dan masyarakat sini masih kurang pengetahuannya dalam mengenai hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LINMAS pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“tidak pernah ada pembinaan dalam bidang hukum, masyarakat sini hana tau sedikit tentang hukum dan pikiran mereka itu hukum di indonesia ini tidak adil.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa tidak pernah melalukakan pemberdayaan kepada masyarakat pada bidang ini. dan masyarakat juga tidak perenah menuntut untuk mau tau tetang hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah TK pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“kepala desa tidak pernah melakukan pemberdayaan ini. dan masyarakat sini baik-baik saja hampir tidak pernah ada yang bermasalah dengan hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“masyarakat sini tidak pernah ada yang bermasalah dengan hukum, dan kepala desa juga tidak pernah mengadakan pembinaan pada bidang hukum ini.”

Menurut pengamatan penulis tentang kinerja kepala desa bahwa di Desa Eka Sapta bahwa benar kepala desa kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemuda-pemuda desa tentang masalah hukum. Kepala desa kurang mengingatkan kepada para pemuda agar jauhi barang-barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya. Dalam hal ini tentu saja kepala desa menginginkan warganya bebas dari hukum.

d. Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun bentuk program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu bentuk lain pada Pembinaan di bidang ini adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kewiraswastaan pengusaha muda, terutama di kalangan pedagang kecil. Contoh para pengusaha untuk meningkatkan usahanya diberi pinjaman modal dengan bunga rendah dan bergulir untuk dipinjamkan selanjutnya ke kelompok lain. Kegiatan pembinaan ini disebut dengan usaha peningkatan pendapatan

masyarakat desa (UDSP). Sebagian besar kegiatan ini telah memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Adanya kegiatan yang dilakukan oleh PNPM mandiri dengan membuat program simpan pinjam perempuan maka tingkat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu pembinaan di bidang perkoperasian dilakukan oleh aparat desa dengan mengajak masyarakat untuk menyimpan dan menyalurkan dana bagi masyarakat lain yang membutuhkan.

Tabel 4.15
Tanggapan responden tentang pemberdayaan masyarakat
pada bidang ekonomi

Tanggapan Responden	Bobot	F	%	Nilai	Skor rata-rata
Sangat baik	5	0	0	0	0
Baik	4	13	25,12%	21	1.00
Cukup baik	3	37	43,73%	47	2.00
Kurang baik	2	22	31,15%	35	1.00
Sangat tidak baik	1	0	0	0	0
Jumlah		72	100	103	4.00

Sumber : hasil observasi 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \frac{[(F1 \times B1) + (F2 \times B2) + (F3 \times B3) + (F4 \times B4) + (F5 \times B5)]}{72} \\
 &= \frac{[(0 \times 1) + (22 \times 2) + (37 \times 3) + (13 \times 4) + (0 \times 5)]}{72} \\
 &= \frac{0 + 35 + 47 + 21 + 0}{72} \\
 &= \frac{103}{72} = 1,43
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa kinerja kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi sebanyak 13 orang atau 25,12% responden menjawab dengan baik. Sebanyak 37 orang atau 43,73% responden

menjawab dengan cukup baik. Dan sebanyak 22 orang atau 31,15% responden menjawab dengan kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang bernama Imam Supriyadi pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kalau pemberdayaan dalam bidang ekonomi ini jarang saya lakukan karena rata-rata masyarakat disini berjiwa wirausaha, apalagi dalam masalah beras rasking saya tidak pernah lakukan juga karena 99% masyarakat disini punya lahan sawah, terus dalam memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah selalu saya lakukan dan itu beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Dan itu anggaranya berasal dari ADD yang sudah diprogramkan untuk beasiswa sekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa yang bernama Nuri Jauhari pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“pemberdayaan dibidang ekonomi ini jarang sekali kami lakukan karena masyarakat disini sudah menanam ekonominya sendiri, contohnya beras, masyarakat disini hampir semua rata-rata punya padi dan kebun sawah. Pekerjaan masyarakat disini adalah petani.”



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD yang bernama Gabriel pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“masyarakat disini tidak pernah susah kalau masalah makanan. Adapun mereka sengsara karena masalah uang dan itupun mungkin orangnya malas kerja dan tidak mau bekerja makanya seperti itu. Ditambah lagi pemerintah tidak pernah melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua RT yang bernama Samadi pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa jarang melakukan pembinaan ekonomi kepada masyarakat untuk berwirausaha. Ekonomi masyarakat di desa ini sudah mencukupi kehidupan sehari-harinya sebab rata-rata masyarakat sini adalah petani.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM yang bernama Davit Muda Kuman pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa jarang melakukan pembinaan ekonomi kepada seluruh masyarakat, hanya saja sering memberikan bantuan berupa uang bagi masyarakat yang kurang mampu dan kebutuhan untuk para petani.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PKK yang bernama Feridiana Bulan pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa jarang melakukan pembinaan ekonomi, hanya saja beliau selalu memberikan masukan-masukan kepada para pedagang dan selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LINMAS pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa disini terlalu dekat dengan masyarakat sehingga beliau tau kekurangan para rakyatnya, beliau terlalu murah hati sehingga beliau selalu memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yang bernama Gabriel Gati Wuka pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kepala desa terlalu baik dengan masyarakat, setiap hari selalu mengelilingi kampung pakai mobilnya dan selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta tau kekurangan masyarakatnya. Beliau selalu memberikan bantuan kepada para petani dan masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah TK pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“kehidupan masyarakat di desa ini sudah cukup baik ekonominya dan kepala desa selalu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan dukungan dan bantuan-bantuan kepada masyarakat, entah itu dari pemerintah desa maupun dari pemerintah daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD pada tanggal 26 juli 2015 tentang kinerja kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa pada bidang ekonomi. Maka, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“Dalam bidang ekonomi masyarakat sudah merasa kecukupan dan kepala desa sangat berperan dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat maupun ekonomi desa. Hal ini terbukti dalam bantuan-bantuan yang diberikan beliau.”

Berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang kinerja kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi jarang dilakukan. Apalagi dalam pemberian bantuan beras rasking dan pemberdayaan kepada wirausaha pemerintah desa jarang dilaksanakan, padahal pemberdayaan ini penting dan harus dijalankan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka langkah akhir dari penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya yaitu :

1. Kepala Desa telah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Eka Sapta. Hal ini terlihat dari berbagai tugas kepala desa dalam menetapkan peraturan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan membina perekonomian desa. Ketiga tugasnya telah dijalankan sehingga kinerja kepala desa dalam bidang pemerintahan telah baik walaupun dengan sumber dayanya yang terbatas namun ambisi dan semangat kerjanya yang tinggi sehingga kepala desa mampu memegang amanah dari undang-undang desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Eka Sapta.
2. Pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan belum maksimal bagus karena anggaran desa terbatas. Hal ini terlihat dalam pembangunan jalan yang masih meresahkan masyarakat disebabkan jalanan yang tidak bagus, pembangunan listrik yang belum masuk desa sehingga terlihat di malam hari Desa Eka Sapta masih dalam kegelapan dan selalu menghambat pekerjaan-pekerjaan masyarakat yang berkaitan dengan tenaga listrik sehingga Dalam hal pembangunan belum bisa mensejahterakan masyarakat Desa Eka Sapta.

Namun sebaliknya dengan pembangunan pertanian, pembangunan dibidang pertanian ini sangat baik, efektif dan berhasil menciptakan hasil-hasil produksi yang unggul dan membawa citra baik desa dimata Kabupaten dan Kecamatan sehingga desa ini dijuluki oleh Bupati Berau Desa jagung dengan kualitas terbaik di Kalimantan Timur.

3. Tugas Kepala Desa Eka Sapta dalam kemasyarakatan belum maksimal hal ini terlihat dalam pemberdayaan masyarakat pada bidang keagamaan sudah baik, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang belum sering dilaksanakan oleh kepala desa, kurangnya kesadaran dari pemerintah desa bahwa kesehatan itu sangat penting karena masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang sejahtera. Dan pemberdayaan masyarakat pada bidang hukum belum terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat di desa ini kurang kesadaran akan hukum. Dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi juga masih terlihat sama dengan pemberdayaan yang lain, yang belum efektif.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam mengembang amanah dari Undang-Undang Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Eka Sapta, Kepala Desa harus terus meningkatkan kinerja dalam menetapkan peraturan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan membina perekonomian desa serta terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan semangat kerja yang tinggi sehingga mampu mensejahterakan masyarakat Desa Eka Sapta.

2. Kepala Desa Eka Sapta harus lebih tingkatakan kinerja dalam pembangunan, yang terutama dalam pembangunan jalan agar masyarakat mudah mengakses berbagai kebutuhan dalam desa atau antar desa. Selain itu, Pembangunan listrik yang harus diadakan dalam desa agar desa ini tidak terlihat gelap dimalam hari sebab Desa Eka Sapta bukan desa terbelakang melainkan desa ini adalah desa induk pertanian Sekabupaten Berau. Jadi kepala desa harus mampu memaksimalkan Pembangunan jalan dan listrik sebab kedua-duanya adalah sumber kesejahteraan masyarakat serta lebih tingkatkan lagi pembangunan pertanian supaya masyarakat lebih sejahtera dalam menikmati hasil kinerja kepala desa dalam pembangunan.
3. Kinerja Kepala desa perlu ditingkatkan dalam urusan kemasyarakatan, perlu melaksanakan pembinaan masyarakat dibidang kesehatan, sebab kesehatan itu penting dan masyarakat selalu sehat serta bebas dari penyakit. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang keagamaan dan hukum terus ditingkatkan lagi agar kesadaran masyarakat dalam hukum semakin baik dan terus tingkatkan siraman-siraman qolbu atau rohani dalam diri masyarakat agar lebih terjaga moral dan pikiranya sehingga selalu berperilaku baik dimasyarakat. Kepala Desa juga harus lebih perhatikan ekonomi masyarakat agar dapat mengurang angka kemiskinan dalam desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahua M. Ikbal, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyuluh Pertanian dan Dampaknya Pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo*, Disertasi: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Daft, Richard L.2006. *Manajemen*, Edisi Keenam Jakarta: Salemba Empat
- Hofer, M.,dkk. 2007. *Individual Values, Motivational Conflicts, and Learning For School*. Journal Learning and Instruction. Elsevier Ltd. Vol. 17 (17-28)
- Luthans, Fred, 2005. *Perilaku Organisasi, Edisi Sepuluh*, Diterjemahkan oleh : Vivin Andhika Yuwono; Shekar Purwanti; Th.Arie Prabawati; dan Winong Rosari. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Lusthaus, C. etal., 2002. *Organizational Assesment: A Framework For Improvig Performance*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Miles Dan Huberman. 2007. *Penelitian Kualitatif Dan Teknik Analisa Data Parmenter*, D., 2010, Key Performance Indicators, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Robbins, Stephen P., 2006. *Perilaku Organisasi*, PT Indeks, Kelompok Gramedia, Jakarta
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia*. Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : alfabeta

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suhartono, dkk, 2001. *Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soehartono Irawan, Marjuki dan Edi Suharto, 2006, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*.
- Sondang P. Siagian. *Organisasi Kepemimpinan dan perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 199.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Internet :

<http://otonomidaerahdalamkontekspengelolaansumberdayalamdanlingkunganhidup//otda1.htm>. 10/01/2015.15:38

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/14/name/riau/detail/1409/kuantan-sengingi>, 10 januari 2015, 12:43

<http://alha-raka.org/menciptakan-otonomi-desa-melalui-organisasi-rakyat-yang-kuat-gagasan/>, 10 januari 2015, 10:12

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Informan	Responden
1	Tugas kepala desa dalam urusan pemerintahan	1) Bagaimana kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa? 2) Bagaimana kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa? 3) Bagaimana kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat?	Kepala desa Sekretaris desa Ketua BPD dan 9 unsur Ketua Aparatur Desa	Unsur Masyarakat Yang Berdasarkan Pekerjaan dan Unsur Ketua Aparatur Desa
2	Tugas kepala desa dalam urusan pembangunan	1) Bagaimana kinerja kepala desa dalam melaksanakan pembangunan jalan? 2) Bagaimana kinerja kepala desa dalam melaksanakan pembangunan listrik? 3) Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian?	Kepala desa Sekretaris desa Ketua BPD dan 9 unsur Ketua Aparatur Desa	Unsur Masyarakat Yang Berdasarkan Pekerjaan dan Unsur Ketua Aparatur Desa
3	Tugas kepala desa dalam urusan kemasyarakatan	1) Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembinaan pada bidang agama? 2) Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembinaan pada bidang kesehatan? 3) Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembinaan pada bidang hukum? 4) Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembinaan pada bidang ekonomi?	Kepala desa Sekretaris desa Ketua BPD dan 9 unsur Ketua Aparatur Desa	Unsur Masyarakat Yang Berdasarkan Pekerjaan dan Unsur Ketua Aparatur Desa

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana kinerja kepala desa dalam menetapkan peraturan desa?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat Tidak baik

2. Bagaimana kinerja kepala desa dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat tidak baik

3. Bagaimana kinerja kepala desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat Tidak baik

4. Bagaimana kinerja kepala desa dalam melaksanakan pembangunan jalan?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat Tidak baik

5. Bagaimana kinerja kepala desa dalam melaksanakan pembangunan listrik?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat Tidak baik

6. Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembangunan pertanian?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik



c. Cukup baik

e. Sangat tidak baik

d. Kurang baik

7. Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembinaan pada bidang agama?

a. Sangat baik

d. Kurang baik

b. Baik

e. Sangat Tidak baik

c. Cukup baik

8. Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembinaan pada bidang kesehatan?

a. Sangat baik

d. Kurang baik

b. Baik

e. Sangat Tidak baik

c. Cukup baik

9. Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembinaan pada bidang hukum?

a. Sangat baik

d. Kurang baik

b. Baik

e. Sangat Tidak baik

c. Cukup baik

10. Bagaimana kinerja kepala desa dalam pembinaan pada bidang ekonomi?

a. Sangat baik

d. Kurang baik

b. Baik

e. Sangat Tidak baik

c. Cukup baik









PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BERAU

Jalan Dr. Murjani II Telp. (0554) 21222 Fax. (0554) 2030130
Tanjung Redeb

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : **34** /Kesbangpol-I/ V /2015

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2014 Rincian, Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang perijinan melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing
- Menimbang** : 1. Rangkap Proposal Skripsi Nomor A.164/FSP/U-45/VII/2015

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Wa Ode Mulyati
Jabatan : Peneliti Utama
Alamat : Jln.Suka Maju 2 Makassar
Judul Penelitian : Evaluasi Kinerja Kepala Desa Ekasapta Kecamatan Talisayan Kab.Berau
Bidang Penelitian : Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Administrasi Negara
Lokasi yang dituju : Kecamatan talisayan
Lama Penelitian : Juli 2015 s/d Desember 2015
Nama Lembaga : Universitas " 45 " Makassar
Status Penelitian : Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

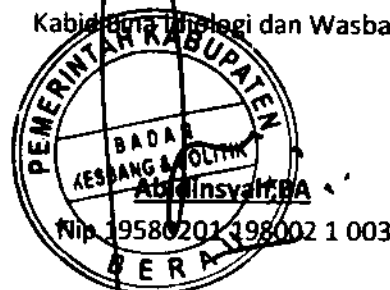
1. Sebelum Pelaksanaan penelitian agar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta melapor kepada pejabat setempat
2. Melampirkan Proposal Penelitian/Kegiatan
3. Aktivitas yang dilakukan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya
4. Setelah menyelesaikan penelitian agar menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Berau Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau.

Dikeluarkan Di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 27 Juli 2015

An.Kepala Badan Kesbang dan Pol Kab. Berau

Kabid. Bang. dan Wasbang



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di- Samarinda
2. Bupati Berau (Sebagai Laporan) di- Tanjung Redeb
3. Kapolres Berau di- Tanjung Redeb
4. Kepala Badan Kesbang Pol Kab. Berau di- Tanjung Redeb
5. Kepala badan Kesbangpol Kal-Tim di- Samarinda
6. Camat Sekabupaten Berau